Katalog: 4102004.6109

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEKADAU

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEKADAU

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sekadau 2021

ISSN : -
No. Publikasi : **61090.2228**
Katalog BPS : **4102004.6109**
Ukuran Buku : **14,8 cm x 21 cm (A5)**
Jumlah Halaman : **xvi + 146 halaman**

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau

Gambar Kulit dan Tata Letak:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau

Ilustrasi:
freepik.com

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau

https://sekadaukab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau.

Tim Penyusun

Pengarah :
Leila Ayu Zanaria, S.E.
Kepala

Penyunting :
Arif Rahman, S.Tr.Stat.
Penanggung Jawab Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penulis :
Tju Ji Long, S.Tr.Stat.
Statistisi Ahli Pertama Fungsi NWAS

Pengolah Data :
Tju Ji Long, S.Tr.Stat.
Statistisi Ahli Pertama Fungsi NWAS

Pemeriksa Tabel :
Febi Taufiqurrahman, S.Tr.Stat.
Statistisi Ahli Pertama Fungsi NWAS

Perancang Gambar Kulit dan Tata Letak :
Tju Ji Long, S.Tr.Stat.
Statistisi Ahli Pertama Fungsi NWAS

https://sekadaukab.bps.go.id

Kata Pengantar

Informasi capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan arah pembangunan. Capaian pembangunan bisa terukur ketika ada keterbandingan data antarwaktu dan sifatnya berkesinambungan. Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menghasilkan beberapa indikator statistik sosial ekonomi yang diperlukan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran akuntabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Publikasi "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sekadau 2021" ini menampilkan beberapa informasi umum kesejahteraan rakyat yang meliputi indikator: kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga (makanan dan nonmakanan). Terbitnya publikasi ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi para pelaku dan perencana pembangunan wilayah sehingga arah pembangunan kesejahteraan rakyat lebih terarah dan tepat sasaran.

Kepada semua pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan publikasi ini hingga terwujud tepat waktu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sekadau, Desember 2022

Kepala,

Leila Ayu Zanaria

https://sekadaukab.bps.go.id

Daftar Isi

Tim Penyusun iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi v

Daftar Tabel viii

Daftar Gambar xi

Ringkasan Eksekutif xiv

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Tujuan 3

1.3 Metodologi Survei 4

1.3.1 Ruang Lingkup 5

1.3.2 Kerangka Sampel 5

1.3.3 Rancangan Penarikan Sampel Rumah Tangga 6

1.3.4 Metode Pengumpulan Data 7

1.3.5 Pengolahan Data 7

1.3.6 Sistematika Penyajian 7

1.4 Konsep dan Definisi 8

Bab II Kependudukan 25

2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk Kabupaten Sekadau 27

2.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur 33

2.3 Rumah Tangga dan Status dalam Rumah Tangga 37

Bab III Fertilitas dan Keluarga Berencana 41

3.1 Fertilitas 42

https://sekadaukab.bps.go.id

3.2 Rasio Anak-Wanita 43
3.3 Status Perkawinan 45
3.4 Umur Kawin Pertama 47
3.5 Pemakaian Alat Kontrasepsi 52

Bab IV Pendidikan 56
4.1 Fasilitas Pendidikan 59
4.2 Partisipasi Sekolah 63
4.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 71
4.4 Kemampuan Membaca dan Menulis 73

Bab V Kesehatan 75
5.1 Sarana Kesehatan 77
5.2 Keluhan Kesehatan Penduduk 80
5.3 Penolong Persalinan 86
5.4 Kesehatan Balita 89
5.4.1 Pemberian ASI 89
5.4.2 Imunisasi 92

Bab VI Ketenagakerjaan 93
6.1 Angkatan Kerja 95
6.2 Lapangan Usaha Utama 98
6.3 Status Pekerjaan Utama 99
6.4 Jumlah Jam Kerja 101
6.5 Pendidikan Pekerja 103
6.6 Sektor Lapangan Usaha Utama 105

Bab VII Perumahan 108
7.1 Kepemilikan Rumah 110

https://sekadaukab.bps.go.id

7.2 Luas Lantai 112
7.3 Jenis Lantai 114
7.4 Jenis Dinding 116
7.5 Jenis Atap 118
7.6 Sumber Penerangan Utama 119
7.7 Sumber Air Minum Utama 121
7.8 Fasilitas Jamban/Kakus 123
7.9 Penguasaan Teknologi Informasi 126

Bab VIII Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 131
8.1 Penduduk Miskin 134
8.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 137
8.3 Rata-rata Konsumsi per Kapita 138
8.4 Proporsi Pengeluaran 142

Daftar Pustaka 146

https://sekadaukab.bps.go.id

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta Sex Ratio di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 30

Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 31

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin serta *Sex Ratio* di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 34

Tabel 4. Persentase Penduduk Menurut Status Dalam Rumah Tangga dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 39

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 45

Tabel 6. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 ... 51

Tabel 7 . Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 58

Tabel 8. Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 60

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 62

Tabel 10. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas Menurut Partisipasi Sekolah, Jenis Kelamin, dam Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 65

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 72

Tabel 12. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 77

Tabel 13. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 80

Tabel 14. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Merasa Kegiatan Terganggu, Selama Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 81

Tabel 15. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 96

Tabel 16. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 99

Tabel 17. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 100

Tabel 18. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Sektor Formal/Informal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 106

Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Komputer/Laptop dan Klasifikasi Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 128

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 20. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Misikin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota 136

Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 138

Tabel 22. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Rumah Tangga Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 140

Tabel 23. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Nonmakanan Rumah Tangga Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 142

Tabel 24. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita/Bulan Menurut Kelompok Konsumsi dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 143

https://sekadaukab.bps.go.id

Daftar Gambar

Gambar 1. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 48

Gambar 2. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Pernah Kawin Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 53

Gambar 3. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Jenis Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 (Persen) 55

Gambar 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 67

Gambar 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 68

Gambar 6. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 70

Gambar 7. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021..... 74

Gambar 8. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 82

Gambar 9. Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 84

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 10. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 85

Gambar 11. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir di Kabupaten Sekadau Tahun 2021..... 87

Gambar 12. Persentase Bayi Berumur 0-23 Bulan yang diberi ASI Eksklusif di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 90

Gambar 13. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Jenis Kelamin, dan Status Daerah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 102

Gambar 14. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021... 104

Gambar 15. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 111

Gambar 16. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Sekadau Tahun 2021..... 113

Gambar 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 115

Gambar 18. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding RumahTerluas di Kabupaten Sekadau Tahun 2021..... 117

Gambar 19. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah Terluas di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 118

Gambar 20. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Rumah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 119

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 122

Gambar 22. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 124

Gambar 23. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 125

Gambar 24. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/*Laptop* di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 127

Gambar 25. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Akses Internet, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 129

https://sekadaukab.bps.go.id

Ringkasan Eksekutif

Total penduduk Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sebesar 212.878 jiwa yang terdiri dari 110.350 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 102.528 jiwa berjenis kelamin perempuan dan rasio jenis kelaminnya adalah 108. Kemudian, rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau adalah sekitar 33 jiwa per km^2. Apabila dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk terjarang terjadi di Kecamatan Belitang Hulu yaitu sekitar 17 jiwa per km^2 dan wilayah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Sekadau Hilir yaitu sebesar 77 jiwa per km^2.

Dilihat dari status perkawinan, penduduk yang memiliki status perkawinan kawin (62,46%), belum kawin (30,17%), dan cerai (7,37%). Menurut pemakaian alat kontrasepsi oleh wanita usia subur (WUS) yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Sekadau, sekitar 73,66 persen sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi, sudah tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi lagi ada 9,60 persen, serta tidak pernah menggunakan alat/cara kontrasepsi ada 16,75 persen.

Komposisi penduduk usia sekolah dasar dan menengah (7-18 tahun) di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021, berjumlah sebanyak 40.994 jiwa, atau kurang lebih sekitar 20 persen dari jumlah seluruh penduduknya. Berdasarkan jenjang pendidikan maka kelompok usia Sekolah Dasar/ SD (usia 7-12 tahun) sebanyak 23.099 jiwa, kelompok usia Sekolah Menegah Pertama/ SMP (usia 13-15 tahun) sebanyak 8.784 jiwa, dan kelompok usia Sekolah Menegah Atas (usia 16-18 tahun) sebanyak 9.111 jiwa. APS usia 7-12 tahun sekitar 98,76 persen, APS usia 13-15 tahun sebesar 89,99 persen, dan APS 16-18 tahun adalah 68,77

https://sekadaukab.bps.go.id

persen. Lalu, APK SD/sederajat bernilai sekitar 113,54 persen, APK SMP/Sederajat bernilai sebesar 89,0 persen, dan APK SMA/Sederajat sekitar 76,03 persen. Kemudian, APM SD/sederajat bernilai sekitar 97,79 persen, APM SMP/Sederajat bernilai sebesar 65,54 persen, dan APM SMA/Sederajat sekitar 47,00 persen. Selanjutnya, angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sekadau adalah sebesar 93,27 persen.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Sekadau terdapat 1 unit Rumah Sakit Umum (RSU) , 12 unit puskesmas , 253 posyandu, 112 polindes, dan 12 unit poliklinik. Secara umum, terdapat 31,60 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan yang lalu pada tahun 2021.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Sekadau adalah sebesar 71,98 persen serta sebanyak 97,08 persennya di antaranya telah memiliki pekerjaan dan 2,92 persen lainnya adalah pengangguran. Lapangan usaha utama yang paling dominan menyerap tenaga kerja adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan (64,44 persen), sementara yang paling sedikit adalah sektor industri pengolahan atau manufaktur (10,82 persen). Selanjutnya, penduduk yang jam kerjanya lebih dari 35 jam seminggu yaitu sebesar 41,47 persen.

Menurut kepemilikan rumah, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri (91,92 persen), bebas sewa milik orang lain (5,62 persen), kontrak/sewa (1,03 persen), dan status lainnya (1,43 persen). Lalu, rumah tangga memiliki luas lantai kurang dari 10 m^2 sekitar 26,34 persen dan sisanya lebih dari 10 m^2. Kemudian, mayoritas rumah tangga sudah menggunakan jenis lantai bukan tanah (99,50 persen). Selanjutnya, dinding rumah yang ditempati oleh rumah tangga sebagian besar adalah jenis rumah berkualitas permanen dan semi permanen. Dan, jenis atap

https://sekadaukab.bps.go.id

yang paling banyak digunakan oleh rumah adalah atap seng (94,54 persen).

Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp351.726** per kapita per bulan dan persentase penduduk miskin adalah sekitar 6,26 persen. Lalu, pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan dan nonmakanan dominan berada pada kisaran Rp1000.000 hingga Rp1.499.999 per bulannya (28,67 persen). Selanjutnya, total rata-rata pengeluaran rumah tangga adalah sebesar Rp. 999.316 per kapita per bulan.

https://sekadaukab.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

https://sekadaukab.bps.go.id

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menentukan bahwa strategi pembangunan ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Tinggi rendahnya kualitas hidup masyarakat tecermin dari aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat dan dapat diukur dengan indikator–indikator kesejahteraan rakyat yaitu meliputi: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Untuk mengukur kualitas hidup masyarakat tersebut, diperlukan data dan informasi statistik yang bersifat menyeluruh dalam rangka pengawasan aspek-aspek apa saja yang sudah baik kualitasnya, dan hal-hal lainnya yang masih memerlukan perbaikan sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat dapat tercapai.

Sejauh ini data tentang aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat dikumpulkan melalui berbagai macam kegiatan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu dari hasil sensus-sensus dan survei-survei di antaranya: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan lain sebagainya. Banyak ragam survei yang dilakukan oleh BPS, tetapi Susenas merupakan survei semesteran dengan cakupan data sosial-ekonomi relatif paling lengkap dibanding survei-survei lainnya. Data yang dikumpulkan melalui Susenas meliputi:

https://sekadaukab.bps.go.id

pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kriminal, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga. Susenas memiliki Modul Tahunan dan akan berulang tiga tahun sekali.

Terkait dengan kebutuhan data statistik tentang kesejahteraan rakyat, maka pada tahun 2021, BPS berupaya menerbitkan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sekadau Tahun 2021. Publikasi ini akan memotret kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sekadau secara makro, melalui kegiatan Susenas yang pengumpulan datanya dilaksanakan pada tahun 2021. Dengan demikian, pada tahun 2021 kegiatan utama penyusunan publikasi ini adalah melakukan tabulasi data, penghitungan indikator, penyusunan pokok bahasan dan analisis data.

Diperolehnya gambaran statistik kesejahteraan rakyat dimaksud diharapkan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang dapat lebih terarah, dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum, dan pada akhirnya, kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sekadau menjadi semakin lebih baik seiring dengan dinamika pembangunan wilayah.

https://sekadaukab.bps.go.id

1.2 Tujuan

Tujuan umum penerbitan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kualitas dan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 yang meliputi aspek: demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan konsumsi rumah tangga. Indikator-indikator ini secara akumulasi menunjukkan cerminan riil

kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan pendekatan penelitian unit terkecil yaitu rumah tangga.

Secara khusus sasaran dari penerbitan publikasi ini adalah:

1. Tersedianya data makro tentang kesejahteraan rakyat yang sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan dan alat untuk melihat keadaan, monitoring, dan mengevaluasi capaian hasil-hasil pembangunan.
2. Terhimpunnya data sosial tentang aspek perumahan, kesehatan dan gizi, yang sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah kabupaten, baik untuk perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang khususnya perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat.

https://sekadaukab.bps.go.id

1.3 Metodologi Survei

Kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara rutin oleh BPS diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data hasil survei dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat monitoring program-program pembangunan khususnya bidang sosial. Pada tahun 2015, pengumpulan data Susenas dilakukan secara semesteran, mengalami perubahan periode pengumpulan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara triwulanan. Hal ini utamanya disebabkan karena beban/jumlah pertanyaan terlalu berat/banyak, sehingga cukup memberatkan petugas dalam pengumpulan data secara triwulanan. Susenas semester I dan II berturut-turut dilaksanakan pada bulan Maret dan September. Data hasil

pencacahan setiap semester dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan data hasil pelaksanaan pada Bulan Maret dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

1.3.1 Ruang Lingkup

Pada publikasi ini data yang digunakan adalah Susenas Maret 2021 yang dilaksanakan di seluruh daerah Republik Indonesia (RI) termasuk Kabupaten Sekadau dengan unit penelitiannya adalah rumah tangga. Jumlah sampel pada Bulan Maret 2021 di Kabupaten Sekadau adalah sebanyak 517 rumah tangga yang tersebar di 7 kecamatan secara proporsional. Seluruh rumah tangga sampel terpilih, dicacah dengan kuesioner Susenas-KOR, yang menghimpun data pokok rumah tangga tentang perumahan dan lingkungan sekitar tempat tinggal (sanitasi), data pokok individu tentang kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya lainnya, serta kuesioner Susenas-Konsumsi dan Pengeluaran yang menghimpun data pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun nonmakanan.

https://sekadaukab.bps.go.id

1.3.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel Susenas Maret 2021 terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

1. Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.

2. Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar 25% blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. 25% blok sensus inilah yang disebut sebagai sampling frame induk
3. Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

1.3.3 Rancangan Penarikan Sampel Rumah Tangga

Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel dua tahap berstrata (*two stages one phase stratified sampling*). Dalam hal ini, populasi terlebih dahulu dibedakan menjadi dua strata, yaitu strata perkotaan dan strata perdesaan. Penarikan sampel dilakukan independen untuk masing-masing strata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

https://sekadaukab.bps.go.id

Tahap pertama, memilih 25% blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.

Tahap kedua, memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic sampling* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.

Tahap ketiga, memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT.

1.3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung atau tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada individu, diusahakan agar individu bersangkutan dapat diwawancarai secara langsung. Sementara keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/ istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain dewasa yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga sampel terpilih.

1.3.5 Pengolahan Data

Pengolahan data sejak tahap pemeriksaan konsistensi antar isian kuesioner, perekaman data *(entry data*) sampai dengan tahap tabulasi, penghitungan indikator, sepenuhnya dilakukan dengan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan (konsistensi) antara jawaban yang satu dengan yang lainnya.

https://sekadaukab.bps.go.id

1.3.6 Sistematika Penyajian

Publikasi Indikator Kesejahteran Rakyat Kabupaten Sekadau 2021 ini menyajikan berbagai indikator sosial ekonomi rumah tangga di Kabupaten Sekadau selama tahun 2021, yang dilengkapi dengan analisis deskriptif sederhana, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEPENDUDUKAN

BAB III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

BAB IV PENDIDIKAN

BAB V KESEHATAN

BAB VI KETENAGAKERJAAN

BAB VII PERUMAHAN

BAB VIII PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

1.4 Konsep dan Definisi

https://sekadaukab.bps.go.id

1. Desa

Desa adalah satuan daerah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Klasifikasi Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Penentuan suatu desa/kelurahan digolongkan perkotaan dan perdesaan dilakukan pada Sensus Penduduk 2010. Klasifikasi didasarkan pada skor yang dihitung dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian dan tersedianya fasilitas sosial seperti sekolah, pasar, rumah sakit, jalan aspal dan listrik.

3. **Blok Sensus**

Adalah daerah kerja pencacah yang dengan membagi habis desa atau kelurahan menjadi blok sensus-blok sensus. Setiap blok sensus mempunyai batasan yang jelas dan mencakup 80 – 120 rumah tangga, atau bangunan fisik bukan tempat tinggal atau gabungan dari keduanya.

4. **Bangunan Fisik/Sensus**

   a. **Bangunan fisik** adalah tempat perlindungan tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai dan atap baik digunakan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Suatu bangunan bukan tempat tinggal dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya paling sedikit 10 m^2. Persyaratan luas ini tidak berlaku untuk bangunan tempat tinggal.

   b. **Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan penggunaan.

https://sekadaukab.bps.go.id

5. **Rumah Tangga**

Rumah Tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dalam satu dapur. Yang dimaksud makan dalam satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga selama 6 (enam) bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah kurang dari 6 (enam) bulan tetapi akan

bertempat tinggal 6 (enam) bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

6. Penduduk

Yang dimaksud dengan penduduk adalah semua yang berdomisili didaerah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

7. Umur

Umur seseorang dapat diketahui apabila tanggal, bulan, tahun kelahirannya diketahui. Dalam pencacahan digunakan perhitungan dengan kalender masehi. Di dalam memperhitungkan seseorang harus selalu dibulatkan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, maka pencacah harus mendapatkan keterangan mengenai umur dengan berbagai cara, misalnya dengan menghubungkan kejadian-kejadian penting baik yang bersifat Nasional maupun Daerah.

https://sekadaukab.bps.go.id

8. Status Perkawinan

Status perkawinan dibedakan atas :

a. **Belum Kawin** adalah tidak/belum pernah melaksanakan perkawinan baik karena belum cukup umur atau karena sebab lainnya.

b. **Kawin** adalah mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama atau terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin

sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

c. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerja-an, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

d. **Cerai Mati** adalah status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami/istri karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.

https://sekadaukab.bps.go.id

9. Pendidikan

a. Dapat Membaca dan Menulis

1) Orang yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dalam huruf latin dan lainnya
2) Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *Braille* digolongkan dapat membaca dan menulis.
3) Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacat mereka tidak dapat membaca dan menulis lagi, dianggap dapat membaca dan menulis.
4) Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

b. Pendidikan Yang Ditamatkan

Yang dimaksud dengan "**tamat**" adalah selesai mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi ia mengikuti ujian dan lulus, dianggap "tamat". Dalam Susenas 2010, pendidikan yang ditamatkan dibedakan atas beberapa klasifikasi yaitu :

1) Tidak/belum tamat sekolah dasar
2) Tamat Sekolah Dasar/MI
3) Tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama Umum.
4) Tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kejuruan.
5) Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum
6) Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan
7) Diploma I/II
8) Diploma III/ Sarjana Muda
9) Diploma IV/S1
10) S2/S3

c. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/ belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.

d. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Tidak termasuk mereka yang sedang mengikuti pelajaran di Madrasah Diniyah.

e. Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada

https://sekadaukab.bps.go.id

saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. Bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti program Kejar Paket A dianggap sudah tidak bersekolah lagi.

10. Keluhan Kesehatan

Adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau lain-lain.

11. Proses Kelahiran

Adalah proses lahirnya janin berusia 5 bulan ke atas (bila kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran) dari dalam kandungan ke dunia luar, baik tanda-tanda kelahiran (rasa mules yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, disertai keluarnya lendir, darah dan air ketuban), lahirnya bayi, pemotongan tali pusat dan keluarnya plasenta.

https://sekadaukab.bps.go.id

12. Menyusui

Adalah kondisi seorang ibu yang memberikan air susu ibu secara langsung kepada bayi. Ibu yang menyusui dapat dilakukan oleh ibu kandung maupun bukan ibu kandung.

13. Kesuburan Ibu

a. Wanita Pernah Kawin

Yang dimaksud dengan wanita pernah kawin adalah penduduk/ anggota rumah tangga perempuan/wanita yang pada

saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup atau cerai mati.

b. **Anak Lahir hidup**

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjuk kan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat, seperti jantung berdenyut, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidup an lainnya.

c. **Anak masih hidup**

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup oleh seseorang ibu yang pada saat pencacahan masih hidup baik tinggal bersama-sama maupun yang tinggal di tempat lain.

https://sekadaukab.bps.go.id

14. Ketenagakerjaan

a. Kegiatan Penduduk berumur 15 Tahun Ke atas

Penduduk dibagi atas dua kelompok, yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok AK adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti; yang sedang menunggu panenan dan pegawai yang sedang cuti, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha juga termasuk dalam kelompok AK.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok BAK adalah mereka yang selama seminggu sebelum

pencacahan hanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam katagori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

b. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus-putus. Mereka yang selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi mereka dikatagorikan bekerja seperti :

1) Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena; cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya kerusakan mesin dan lain sebagainya.
2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panenan atau menunggu hujan untuk menggarap sawah
3) Anggota Rumah Tangga (ART) yang membantu melaksanakan pekerjaan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima gaji/upah.
4) Orang-orang yang bekerja dibidang keahlihan seperti dokter, tukang cukur, tukang pijit, dalang dll.

https://sekadaukab.bps.go.id

c. Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Jadi dalam katagori ini juga termasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya, termasuk :

1) Mereka yang masih bekerja, tetapi karena suatu sebab masih mencari pekerjaan
2) Mereka yang dibebas tugaskan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan
3) Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk men-dapatkan pekerjaan.
4) Pekerja bebas yang sedang menunggu pekerjaan (job order) dari pelanggan atau costumer dikatagorikan sebagai mencari pekerjaan, misal kuli bangunan yang sedang menunggu pekerjaan dari pelanggannya.
5) Pekerja serabutan/bebas yang sedang berkeliling untuk mencari order menunggu dari pelanggan tetap (meskipun tidak berkeliling).
6) Mereka yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

https://sekadaukab.bps.go.id

d. Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan. BAK ini terdiri atas beberapa kolompok/golongan antara lain :

1) Sekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Anak sekolah yang sedang libur atau mahasiswa yang sedang cuti/istirahat, apabila tidak ada kegiatan selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan, dianggap masih sekolah.
2) Golongan mengurus rumah tangga adalah mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan.
3) Golongan lainnya adalah mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam katagori sebelumnya. Misalnya mereka yang sudah lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu, dan sebagainya), cacat mental atau lainnya. Apabila seseorang mempunyai lebih dari satu kegiatan misalnya sekolah sambil mengurus rumah tangga, maka hanya dimasukkan ke dalam salah satu golongan di atas menurut waktu terbanyak yang digunakan.

e. Lapangan Usaha

Yang dimaksud dengan lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha /perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha tersebut dapat dibedakan atas :

1) Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan

https://sekadaukab.bps.go.id

2) Pertambangan dan penggalian
3) Industri pengolahan
4) Konstruksi/Bangunan
5) Perdagangan, rumah makan dan hotel
6) Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi
7) Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan Bangunan
8) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
9) Lainnya.

f. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Status pekerjaan ini meliputi antara lain :

1) Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun tidak dibayar seperti:
   - Tukang becak yang membawa becak atas resiko sendiri
   - Sopir taksi yang membawa mobil atas resiko sendiri
   - Kuli-kuli dipasar, stasiun, tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tertentu.
2) Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap adalah mereka yang dalam mengusahakan usahanya dibantu oleh anggota rumah tangga dan atau buruh tidak tetap.
3) Berusaha dengan buruh tetap adalah mereka yang didalam menjalankan usahanya atas resiko sendiri dan dalam

https://sekadaukab.bps.go.id

usahanya mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap yang dibayar.

- Buruh/karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/perusahaan dengan menerima gaji/upah baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan. Seseorang dianggap mempunyai majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan yang sama dalam satu bulan terakhir.
- Pekerja keluarga adalah mereka yang bekerja membantu seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan tidak mendapat gaji/upah baik berupa uang maupun barang.

g. Jenis Pekerjaan

Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Jenis pekerjaan/jabatan dapat dibedakan atas :

1) Tenaga profesional, teknisi dan sejenis
2) Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
3) Tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis
4) Tenaga usaha penjualan
5) Tenaga usaha jasa
6) Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan
7) Tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja
8) Lainnya.

https://sekadaukab.bps.go.id

15. Perumahan dan Pemukiman

a. **Atap** adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

b. **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

c. **Lantai** adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan dan semen. Sedangkan yang dimaksud luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi & kandang ternak. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu tempat tinggal dihuni lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

d. **Sumber air minum** adalah sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga, bila responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air maka dipilih salah satu

https://sekadaukab.bps.go.id

sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan. Sumber air minum ini meliputi : air dalam kemasan, air leding, air pompa, air sumur/perigi, mata air dan lainnya.

e. **Fasilitas air minum** adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PDAM, seperti penyaluran air dari mata air ke rumah dengan menggunakan pipa atau bambu, fasilitas air yang dimaksud :
   1) Sendiri, bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
   2) Bersama, bila fasilitas air minum digunakan oleh rumah tangga bersama dengan beberapa beberapa rumah tangga tertentu.
   3) Umum, bila fasilitas air minum dapat digunakan oleh setiap rumah tangga dengan lama perjalanan (jalan kaki) kurang dari 1 jam ke instalasi.

f. **Jenis kloset** adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC atau kakus. Jenis kloset dapat berbentuk leher angsa, plengsengan, cubluk, cemplung.
   1) Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
   2) Plengsengan adalah jamban atau kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

https://sekadaukab.bps.go.id

3) Cubluk/cemplung adalah jamban atau kakus yang di bawah dudukannya tidak ada salurannya, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/ penampungan akhirnya.

g. **Tempat pembuangan akhir tinja** meliputi:

1) Tangki/SPAL adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak.
2) Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah.
3) Sungai, danau, laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/ laut.
4) Lobang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lobang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
5) Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang termasuk dibuang ke kebun.
6) Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

h. **Sumber Penerangan**

1) Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2) Listrik Non-PLN, adalah sumber penerangan listrik yang dikelola instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola oleh bukan PLN).

https://sekadaukab.bps.go.id

3) Petromak/aladin, merupakan sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan dan aladin (termasuk lampu gas).
4) Lainnya termasuk disini adalah lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.

16. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk nonmakanan. Pengeluaran rumah tangga disini adalah pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga/ anggota rumah tangga saja, tidak termasuk pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak/orang lain.

Pengeluaran untuk makanan, yang dicacat adalah nilai makanan yang betul-betul telah dikonsumsi selama referensi waktu survei *(consumption approach*), sedangkan untuk bukan makanan konsep yang dipakai adalah konsep penyerahan (*delivery approach*), yaitu yang dibeli/diperoleh dari pihak lain, asalkan tujuannya untuk kebutuhan rumah tangga.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, yang berakhir satu hari sebelum hari pencacahan sedangkan untuk nonmakanan dihitung sebulan yang lalu dan setahun yang lalu.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

https://sekadaukab.bps.go.id

https://sekadaukab.bps.go.id

BAB II

KEPENDUDUKAN

Bab II
Kependudukan

Keadaan penduduk suatu daerah sangat erat hubungannya dengan latar belakang sosial budaya di mana penduduk tersebut berada. Faktor pendidikan, perkawinan, adat istiadat, mata pencaharian dan lain-lain akan berpengaruh terhadap keadaan penduduk suatu masyarakat, sehingga keadaan penduduk yang satu akan berbeda dengan keadaan penduduk lainnya.

Sebagai ilustrasi sederhana di beberapa wilayah di Indonesia, pengaruh sosial budaya/tradisi masih cukup dominan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, budaya patriarki yaitu kondisi budaya peranan kaum pria lebih dominan dari pada kaum wanita. Kondisi ini menggambarkan kaum pria menjadi lebih dikenal sebagai pencari nafkah, sedangkan kaum wanita hanya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga.

Untuk membuktikan lebih jauh pernyataan-pernyataan di atas, bab ini akan membahas kondisi kependudukan dan karakteristik yang terjadi di Kabupaten Sekadau, dimulai dengan jumlah dan sebarannya, komposisi rumah tangga dan anggota rumah tangga (ART) di dalamnya, serta status dari masing-masing ART baik dari segi perkawinan dan perannya di dalam rumah tangga. Karakteristik tersebut akan dibahas lebih rinci pada subbab-subbab berikutnya.

https://sekadaukab.bps.go.id

2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk Kabupaten Sekadau

Persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh komponen-komponen demografi seperti kelahiran (fertilitas), dan kematian (mortalitas) yang menyebabkan terjadinya *natural increase* atau pertambahan penduduk secara alamiah yaitu jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian dan migrasi atau *social increase* yaitu pertumbuhan penduduk akibat terjadinya perpindahan karena didorong oleh faktor-faktor sosial seperti: ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Kelahiran atau fertilitas bagaikan sebilah mata pisau, dapat menguntungkan maupun merugikan. Bagi daerah dengan tingkat populasi tinggi tentu mengharapkan penurunan angka fertilitas, tetapi tidak demikian bagi daerah yang jarang populasi penduduknya. Fertilitas masih sangat penting selain untuk keberlangsungan keturunan, melestarikan budaya "banyak anak banyak rezeki" yang masih lekat dipercayai masyarakat menyebabkan masih lumrahnya jika ditemukan banyak anak yang dilahirkan di daerah perdesaan di Indonesia.

Kematian atau mortalitas adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan demikian, *still birth* dan keguguran tidak termasuk dalam pengertian kematian. Perubahan jumlah kematian (naik turunnya) di tiap daerah tidaklah sama, tergantung dari berbagai macam faktor keadaan. Besar-kecilnya tingkat kematian ini dapat dijadikan sebagai petunjuk atau indikator bagi tingkat kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu daerah. Mortalitas dapat dipengaruhi oleh

https://sekadaukab.bps.go.id

beberapa hal, misalnya seperti pendidikan, pendapatan, kesehatan, faktor kelahiran, dan sebagainya.

Migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen, tanpa ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara perpindahan di dalam negeri atau ke luar negeri, dan migrasi dapat terjadi lebih dari satu kali selama hidup seseorang. Oleh karenanya, perlu ditetapkan batasan waktu migran yaitu selama 6 bulan sejalan dengan konsep tempat tinggal. Artinya, seseorang dikatakan migran jika tinggal di tempat baru atau berniat tinggal di tempat baru paling sedikit 6 bulan lamanya. Adapun faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi adalah faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong dari daerah asal antara lain: karena semakin berkurangnya sumber daya alam, kurangnya lapangan pekerjaan, adanya tekanan atau diskriminasi, bencana alam dan lain-lain. Faktor penarik dari daerah tujuan antara lain: lapangan pekerjaan yang lebih besar, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung, adanya aktivitas kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan, dan lain-lain (Munir, 1981).

Uraian di atas menjelaskan bagaimana perubahan penduduk terjadi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sekadau mengalami penambahan sebanyak 29.000-an jiwa menjadi 211.559 penduduk di tahun 2020 dibandingkan dengan hasil Sensus

https://sekadaukab.bps.go.id

Penduduk tahun 2010. Angka ini memberikan dugaan bahwa di Kabupaten Sekadau mengalami *natural increase* yaitu lebih tingginya tingkat fertilitas dibanding mortalitas dan juga terindikasi terjadi *social increase* dimana perpindahan penduduk masuk diduga lebih besar dibandingkan perpindahan penduduk yang keluar.

Untuk membahas lebih jauh terkait dengan *natural increase* dan *social increase* di Kabupaten Sekadau, maka bisa dengan mengkaji angka anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita usia subur (WUS usia 15-49) pernah kawin dan besarnya persentase migrasi risen. Berdasarkan data Susenas Maret 2021, persentase migrasi risen adalah sebesar 1,25 persen dari total penduduk Kabupaten Sekadau, atau sekitar 2.000-an jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa tempat tinggal dari 2.000-an penduduk pada 5 tahun yang lalu, berbeda dengan tempat tinggalnya yang sekarang.

https://sekadaukab.bps.go.id

Di lain sisi, secara rata-rata terdapat sekitar 2 hingga 3 anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur yang pernah kawin di Kabupaten Sekadau. Selanjutnya untuk mendalami mengenai penyebaran penduduk di Kabupaten Sekadau di tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total penduduk Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 terdiri dari 110.350 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 102.528 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, *sex ratio* yang terbentuk adalah 107,63 yang bermakna setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 107 hingga 108 jiwa penduduk laki-laki, atau secara rata-rata jumlah penduduk laki-laki sekitar 7 hingga 8 persen

lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Komposisi penduduk laki-laki yang lebih besar dari penduduk perempuan juga terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta *Sex Ratio* di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanga Mahap	14.408	13.045	27.453	110,45
Nanga Taman	14.567	13.383	27.950	108,85
Sekadau Hulu	15.562	14.365	29.927	108,33
Sekadau Hilir	34.940	33.391	68.331	104,64
Belitang Hilir	12.814	11.598	24.412	110,48
Belitang	7.093	6.645	13.738	106,74
Belitang Hulu	10.966	10.101	21.067	108,56
Kabupaten Sekadau	**110.350**	**102.528**	**212.878**	**107,63**

Sumber: Publikasi Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2022

https://sekadaukab.bps.go.id

Indikator lain yang dapat menunjukkan penyebaran penduduk adalah distribusi penduduk per kecamatan, dan kepadatan penduduk (*population density*). Untuk melihat distribusi penduduk per kecamatan dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk
	(Km^2)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa/Km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanga Mahap	1.205,16	19,24	27.453	12,90	22,78
Nanga Taman	1.069,77	17,08	27.950	13,13	26,13
Sekadau Hulu	854,64	13,65	29.927	14,06	35,02
Sekadau Hilir	891,79	14,24	68.331	32,10	76,62
Belitang Hilir	723,67	11,55	24.412	11,47	33,73
Belitang	336,79	5,38	13.738	6,45	40,79
Belitang Hulu	1.181,25	18,86	21.067	9,90	17,83
Kabupaten Sekadau	**6.263,07**	**100,00**	**212.878**	**100,00**	**33,99**

Sumber: Publikasi Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2022

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa persentase luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Sekadau relatif sama berada di kisaran 10-20 persen kecuali Kecamatan Belitang (luas wilayah terkecil). Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Belitang dengan luas sekitar 336,79 km^2, sementara Nanga Mahap merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas wilayah sekitar 1.205,16 km^2.

Kondisi sebaliknya tergambar dalam persentase sebaran penduduk perkecamatan, di mana Kecamatan Nanga Mahap yang paling luas wilayahnya ternyata hanya dihuni sekitar 13 persen dari total penduduk Kabupaten Sekadau, sedangkan kecamatan Sekadau Hilir yang memiliki luas wilayah sekitar 15 persen dari total luas kabupaten didiami oleh

hampir 32,10 persen penduduk Kabupaten Sekadau. Kecamatan yang relatif sebanding antara luas wilayah dan penduduk adalah Kecamatan Belitang, di mana kecamatan dengan luas sekitar 5 persen dari total luas kabupaten tersebut dihuni sektar 6 persen penduduk Sekadau.

Setelah ulasan di atas, analisis kepadatan penduduk dapat dengan mudah dimengerti. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk (jiwa) terhadap luas daerah (Km^2). Dengan luas wilayah sebesar 6.263,07 Km^2 dan jumlah penduduk sebanyak 212.878 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau adalah sekitar 34 jiwa per km^2.

Ulasan di atas juga menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Sekadau masih tergolong jarang. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan angka rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Barat maka angka ini masih sedikit berada di atas dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 37 jiwa per km^2 (sumber: Kalbar dalam Angka, 2022). Kondisi ini menggambarkan bahwa ternyata di Provinsi Kalimantan Barat masih banyak kabupaten yang tingkat kepadatan penduduknya lebih jarang dibandingkan Kabupaten Sekadau pada kondisi tahun 2021.

Apabila dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau bervariasi antarkecamatan (Tabel 2). Belitang Hulu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terjarang, yakni sekitar 18 jiwa per km^2. Sedangkan wilayah terpadat adalah Kecamatan Sekadau Hilir, yang setiap 1 km^2 wilayahnya dihuni oleh sekitar 77 jiwa penduduk. Bervariasinya kepadatan penduduk antarkecamatan di Kabupaten Sekadau dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial budaya.

https://sekadaukab.bps.go.id

Faktor ekonomi yang memengaruhi kepadatan penduduk antara lain akses transportasi, ketersediaan sumber daya alam, maupun lapangan pekerjaan. Sementara faktor sosial budaya yang memengaruhi kepadatan penduduk antara lain kesempatan meneruskan pendidikan, keterbukaan masyarakat, dan faktor keamanan. Variasi kepadatan penduduk antarkecamatan ini secara tidak langsung menunjukkan juga bervariasinya hasil pembangunan antarwilayah kecamatan. Wilayah yang pesat pelaksanaan pembangunan wilayahnya biasanya akan dibarengi dengan tingkat hunian penduduk yang juga meningkat pesat, karena adanya faktor *social increase*.

Apabila dilihat berdasarkan status wilayahnya maka hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sekadau merupakan daerah dengan status perdesaan. Namun demikian, dari 87 desa di Kabupaten Sekadau, terdapat 5 desa yang berstatus sebagai desa perkotaan, antara lain Desa Sungai Ringin, Desa Seberang Kapuas, Desa Tapang Semadak, Desa Peniti, dan Desa Bokak Sebumbun. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Sekadau Hilir. Apabila dilihat berdasarkan jumlah penduduknya maka penduduk yang mendiami daerah desa perkotaan hanya sekitar 13 persen dari total penduduk sedangkan sisanya 87 persen mendiami daerah desa perdesaan (Susenas, 2021).

https://sekadaukab.bps.go.id

2.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Data penduduk menurut kelompok umur memberikan informasi tentang distribusi struktur umur penduduk, dan merupakan data dasar penghitungan indikator ketergantungan penduduk usia muda dan lanjut

usia (lansia), terhadap penduduk usia produktif dipandang dari aspek ekonomi. Selain aspek ekonomi, perencanaan pembangunan lain yang juga memerlukan data penduduk menurut kelompok umur adalah pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya kelompok umur penduduk usia 7 – 15 tahun digunakan untuk perencanaan bidang pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP), dan kelompok umur penduduk 16–24 tahun lebih difokuskan untuk perencanaan pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Dengan demikian, pada dasarnya sebaran kelompok umur penduduk sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan budaya, baik untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana kehidupan, maupun berbagai fasilitas sosial pendukung lainnya.

Tabel 3 menunjukkan komposisi kelompok umur penduduk Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok umur produktif yaitu usia 15-64 tahun sekitar 69,40 persen, di mana persentase penduduk usia produktif laki-laki sekitar 69,87 persen, sedangkan penduduk usia produktif perempuan sebesar 68,89 persen

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin serta *Sex Ratio* di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	*Sex Ratio*
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 – 4	9.225	8.828	18.053	104,50
5 – 9	9.400	8.874	18.274	105,93

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	*Sex Ratio*
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 – 14	9.198	8.727	17.925	105,40
15 – 19	9.463	8.811	18.274	107,40
20 – 24	9.608	8.694	18.302	110,51
25 – 29	9.852	8.901	18.753	110,68
30 – 34	9.887	9.032	18.919	109,47
35 – 39	8.924	8.002	16.926	111,52
40 – 44	8.081	7.247	15.328	111,51
45 – 49	6.958	6.475	13.433	107,46
50 – 54	5.893	5.485	11.378	107,44
55 – 59	4.865	4.500	9.365	108,11
60 – 64	3.575	3.482	7.057	102,67
65 – 69	2.640	2.494	5.134	105,85
70 – 74	1.414	1.470	2.884	96,19
75+	1.367	1.506	2.873	90,77
Kabupaten Sekadau	**110.350**	**102.528**	**212.878**	**107,63**

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

https://sekadaukab.bps.go.id

Melalui data komposisi umur tersebut dapat dihitung angka ketergantungan di Kabupaten Sekadau yaitu sebesar 44,09 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 44 hingga 45 orang yang belum produktif ditambah yang dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sekadau seperti yang telah diramalkan sudah memasuki masa bonus demografinya, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mendukung kondisi tersebut, seperti penyediaan lapangan kerja yang baik, pelatihan-pelatihan kerja yang mumpuni dan lain sebagainya. Bab ketenagakerjaan selanjutnya akan melihat sejauh apa kesiapan Kabupaten Sekadau dalam menyongsong bonus demografi.

Informasi lain dari Tabel 3 adalah *sex ratio* per kelompok umur memiliki angka di atas 100, kecuali untuk kelompok umur lansia (usia 70 tahun ke atas). Kondisi ini dapat diartikan dua hal, pertama di suatu waktu sebelum tahun 1950an, penduduk laki-laki di Kabupaten Sekadau lebih sedikit dibandingkan perempuan. Atau kedua, kondisi yang pertama tidak terjadi tapi daya tahan hidup penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang menyebabkan berkurangnya penduduk laki-laki sehingga menjadikan penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Yang mana yang mendekati kebenarannya harus dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menjawabnya.

Selanjutnya Tabel 3 juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-19 tahun (anak-anak dan remaja) adalah 72.526 jiwa atau sekitar 34,07 persen dari total penduduk Kabupaten Sekadau. Persentase tersebut relatif banyak mengingat dalam kurun waktu dua hingga tiga puluh tahun mendatang mereka akan menjadi aset potensial

https://sekadaukab.bps.go.id

atau modal pembangunan bila dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk yang baik. Apabila tidak, maka mereka akan menjadi beban pembangunan dan tidak dapat dibayangkan betapa hancurnya Kabupaten Sekadau apabila hal ini tidak diperhatikan. Untuk membahas kualitas ini, bab-bab berikutnya akan membahasnya lebih lanjut.

2.3 Rumah Tangga dan Status dalam Rumah Tangga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dapat terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak-anak, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Dalam pengertian yang lebih luas keluarga merupakan kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga, berinteraksi satu dengan yang lain sesuai dengan peran masing-masing dalam keluarga, dan selalu berusaha mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum atau menciptakan kebudayaannya sendiri.

https://sekadaukab.bps.go.id

Dalam lingkungan keluarga dikenal adanya pola keluarga tambahan (*extended family*) dan keluarga inti (*nuclear family*) yang biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Di Indonesia pola keluarga inti dalam satu rumah tangga masih belum begitu banyak jumlahnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh budaya yang melekat, dengan satu rumah tangga tidak hanya terdiri dari anggota rumah tangga inti saja, melainkan juga ada menantu, cucu, orang tua/mertua, dan famili lainnya. Selain itu ikatan kekeluargaan yang cukup kuat, kepemilikan atau penguasaan rumah tempat tinggal terkait dengan relatif rendahnya kemampuan untuk dapat memiliki rumah sendiri, diduga menjadi faktor besar yang berpengaruh

terhadap terbentuknya pola rumah tangga dengan anggota yang cukup banyak.

Susenas 2021 mencatat bahwa jumlah rumah tangga yang bermukim di Kabupaten Sekadau mencapai angka 50 ribuan keluarga. Dari total rumah tangga tersebut, sekitar 82,14 persen sudah menerapkan satu keluarga dalam satu rumah tangga. Meskipun demikian, ternyata masih ditemukan rumah tangga dengan jumlah keluarga lebih dari 4. Hal menarik lainnya yang dicatat dalam Susenas 2021 adalah dari total rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan ternyata 83,60 persennya merupakan komposisi rumah tangga dengan satu keluarga inti. Persentase ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan yang memiliki persentase sebesar 72,58 persen. Namun, secara keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata keluarga di Kabupaten Sekadau sudah mandiri dengan memulai rumah tangganya sendiri tanpa menggangu rumah tangga orangtuanya.

https://sekadaukab.bps.go.id

Temuan lain dalam Susenas 2021 adalah bahwa rumah tangga yang terbentuk di Kabupaten Sekadau adalah terdiri dari satu kepala rumah tangga dengan anggota rumah tangga rata-rata sebanyak 4 orang. Untuk melihat lebih dalam mengenai komposisi ini, Tabel 4 akan menunjukkannya.

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari total penduduk terdapat sekitar 27,30 persennya berstatus kepala rumah tangga, namun hanya 22,54 persen penduduk yang berstatus sebagai istri/suami. Persentase ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sekadau terdapat rumah tangga yang kepala rumah tangganya merupakan orang tua tunggal.

Tabel 4.
Persentase Penduduk Menurut Status Dalam Rumah Tangga dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Hubungan Dengan Kepala Rumah Tangga	Jenis Kelamin			Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepala Rumah Tangga	90,75	9,25	100,00	27,30
Istri/Suami/Pasangan Hidup	0,00	100,00	100,00	22,54
Anak Kandung/Anak Tiri	54,89	45,11	100,00	40,07
Anak Angkat	42,31	57,69	100,00	0,17
Menantu	60,29	39,71	100,00	2,18
Cucu	53,86	46,14	100,00	3,55
Orangtua / Mertua	12,34	87,66	100,00	2,58
Pembantu/sopir	0,00	100,00	100,00	0,01
Lainnya	41,72	58,28	100,00	1,59
Jumlah	**51,06**	**48,94**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Selain itu, dari Tabel 4 juga menunjukkan bahwa persentase penduduk di Kabupaten Sekadau yang berstatus anak, baik anak kandung/anak tiri maupun anak angkat, mencapai sekitar 40 persen. Persentase ini hampir dua kali lipatnya persentase penduduk yang berstatus kepala rumah tangga yang mengindikasikan bahwa di dalam rumah tangga tersebut terdapat rata-rata dua anak yang ikut tinggal di dalamnya.

Informasi penting lainnya yang disajikan dalam tabel 4 adalah secara garis besar peran penduduk laki-laki masih dominan di Kabupaten Sekadau. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya status kepala rumah

tangga yang didominasi oleh penduduk laki-laki dengan persentase sebesar 90,75 persen.

Informasi lain yang selaras dengan informasi di atas adalah dari total angka penduduk berstatus menantu, 60,29 persennya adalah penduduk laki-laki. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tambahan tinggal bersama keluarga inti penduduk perempuan.

https://sekadaukab.bps.go.id

BAB III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

https://sekadaukab.bps.go.id

Bab III
Fertilitas dan Keluarga Berencana

3.1 Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan faktor demografi yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Fertilitas yang tinggi merupakan salah satu ciri demografi di negara-negara sedang berkembang, dan cenderung menjadi penghambat laju pembangunan, karena fertilitas yang tinggi akan meningkatkan kuantitas penduduk namun sering kali tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut.

Dalam lingkup rumah tangga, semakin banyak anak yang dilahirkan maka semakin besar juga biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tersebut, misalnya: biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata dan lain sebagainya. Sehingga keluarga yang memiliki banyak anak kecenderungannya akan turun juga laju peningkatan kesejahteraan rumah tangganya.

Fertilitas adalah suatu peristiwa dimana seorang perempuan mengalami proses melahirkan anak lahir hidup. Oleh karenanya, fertilitas juga disebut sebagai kelahiran hidup (*live birth*). Lahir hidup sendiri memiliki arti terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan disertai adanya tanda-tanda kehidupan dari bayi tersebut (seperti menangis, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya) tanpa memperhatikan berapa lama bayi tersebut dikandung. Apabila pada saat

https://sekadaukab.bps.go.id

dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kejadian tersebut disebut dengan lahir mati (*still birth*), yang dalam demografi tidak digolongkan sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Ada beragam faktor yang memengaruhi dan menentukan fertilitas baik yang berupa faktor demografi maupun faktor nondemografi. Yang berupa faktor demografi di antaranya adalah struktur umur, umur perkawinan pertama wanita, lama perkawinan, paritas, distrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan faktor nondemografi dapat berupa faktor sosial, ekonomi maupun psikologi.

Faktor-faktor di atas tentunya juga memengaruhi tingkat fertilitas di Kabupaten Sekadau. Sebelum membahas lebih jauh faktor-faktor tersebut, publikasi ini akan membahas seberapa tingginya level fertilitas yang terjadi di Kabupaten Sekadau. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan level fertilitas adalah jumlah angka lahir hidup dan rasio wanita perempuan. Pembahasan mengenai indikator tersebut tersaji pada subbab-subbab berikut.

https://sekadaukab.bps.go.id

3.2 Rasio Anak-Wanita

Penghitungan fertilitas secara langsung tergolong kompleks dan sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan pasangan dari wanita dan bayi yang dilahirkan. Selain itu, mengumpulkan data riwayat kelahiran berkaitan dengan masa lampau, yaitu harus menghitung jumlah kelahiran selama masa reproduksi dari setiap wanita. Tentunya hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan, terlebih tanpa adanya sistem yang terpadu. Kesulitan lainnya adalah

dalam membedakan apakah seorang bayi yang tercatat meninggal berasal dari kelahiran hidup atau kelahiran mati.

Salah satu alat pengukuran yang sangat sederhana yang dapat dipergunakan sebagai indikator fertilitas adalah rasio anak-wanita (*Child-Women Ratio/CWR*). CWR adalah perbandingan antara jumlah anak berumur di bawah lima tahun dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan hidup untuk setiap 100 orang wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin.

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur pada Tabel 3 diketahui perbandingan anak-wanita di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sebesar 288. Angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap 1000 orang wanita usia 15-49 tahun, terdapat 288 orang anak usia 0-4 tahun. Apabila dibandingkan dengan angka rasio tahun lalu yang sebesar 278, maka terjadi kenaikan rasio sebesar 10 anak. Hal ini menunjukkan di tahun 2021, rata-rata beban perempuan yang menjadi ibu untuk mengurus anak-anaknya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk menarik kesimpulan awal bahwa jumlah kelahiran di tahun 2021 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2020. Namun demikian, untuk mendukung pernyataan ini masih perlu dilakukan kajian lebih dalam dan komprehensif mengingat sulitnya untuk mendapatkan data tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka level fertilitas yang terjadi di Kabupaten Sekadau sudah tersajikan. Untuk mempelajari apa penyebab dari level fertilitas tersebut maka subbab-subbab berikutnya akan mengkajinya lebih jauh. Oleh karena keterbatasan data yang ada,

https://sekadaukab.bps.go.id

maka publikasi ini hanya menyajikan faktor proporsi perkawinan, umur kawin pertama dan penggunaan alat kontrasepsi.

3.3 Status Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan, baik sah menurut hukum negara maupun hukum agama. Secara umum, status perkawinan penduduk dibedakan ke dalam empat klasifikasi yaitu: belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Pada tahun 2021, Susenas Maret 2021 mencatat bahwa sebagian besar penduduk yang berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sekadau memiliki status perkawinan kawin (62,46%) dan sekitar 30,17 persennya yang belum kawin. Sedangkan kasus cerai hidup terjadi sekitar 0,88 persen dan kasus cerai mati terjadi sekitar 6,49 persen penduduk Kabupaten Sekadau.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 5.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Status Kawin	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	34,80	25,46	30,17
Kawin	62,15	62,78	62,46
Cerai Hidup	0,74	1,02	0,88
Cerai Mati	2,31	10,74	6,49
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

Apabila ditelaah menurut jenis kelaminnya, maka penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin adalah sekitar 34,80 persen dan 62,15 persennya berstatus kawin. Sedangkan untuk penduduk perempuan yang berusia 10 tahun ke atas, sekitar 25,46 persennya belum kawin dan sekitar 62,78 persennya berstatus kawin.

Perbedaan persentase penduduk yang belum kawin maupun yang berstatus kawin antara laki-laki dan perempuan, diduga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sosial budaya di Kabupaten Sekadau, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Laki-laki usia muda umumnya cenderung membantu orang tua mencari nafkah khususnya di daerah perdesaan, misalnya: membantu bekerja di sawah, kebun maupun ladang, sehingga cenderung menunda usia perkawinannya.
- Disinyalir anak perempuan cenderung lebih cepat dikawinkan oleh orang tuanya, terkait dengan beban tanggung jawab perekonomian keluarga orang tuanya.
- Tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah mengharuskan seorang laki-laki memikirkan keputusannya secara matang untuk menikah, apakah penghasilannya yang diperoleh nantinya dapat mencukupi kebutuhan hidup calon keluarganya kelak.

Sedangkan untuk kasus cerai terdapat sekitar 3,05 persen penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas yang bercerai dan sekitar 11,76 persen penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang bercerai. Apabila dilihat per status cerainya maka sebagian besar penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang bercerai disebabkan ditinggal mati oleh pasangannya. Informasi lain yang didapat dari kasus perceraian adalah rendahnya

https://sekadaukab.bps.go.id

persentase cerai hidup (0,88%) dibandingkan cerai mati (6,49%) di Kabupaten Sekadau. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan penduduk Kabupaten Sekadau terhadap janji perkawinan yang menyatakan *till death do us apart* atau "sampai kematian yang memisahkan kita" masih sangat dipegang kuat.

Informasi menarik lainnya dari kasus perceraian adalah lebih tingginya penduduk perempuan yang cerai mati dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki cenderung lebih dahulu mati jika dibandingkan dengan perempuan yang juga menunjukkan bahwa kemampuan bertahan hidup penduduk perempuan lebih baik dari laki-laki. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan sebelumnya yang diulas pada subbab 2.2.

https://sekadaukab.bps.go.id

3.4 Umur Kawin Pertama

Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap tingginya tingkat fertilitas adalah umur perkawinan pertama yang dialami penduduk perempuan di usia mudanya. Semakin muda umur perkawinan pertama yang dialami penduduk perempuan, akan semakin besar peluang mereka untuk memiliki jumlah anak yang lebih banyak karena masa reproduksi yang mereka alami akan semakin panjang. Sebaliknya semakin tua umur perkawinan pertama mereka maka semakin sedikit peluangnya jumlah anak yang dapat dilahirkan.

Gambar 1.
Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

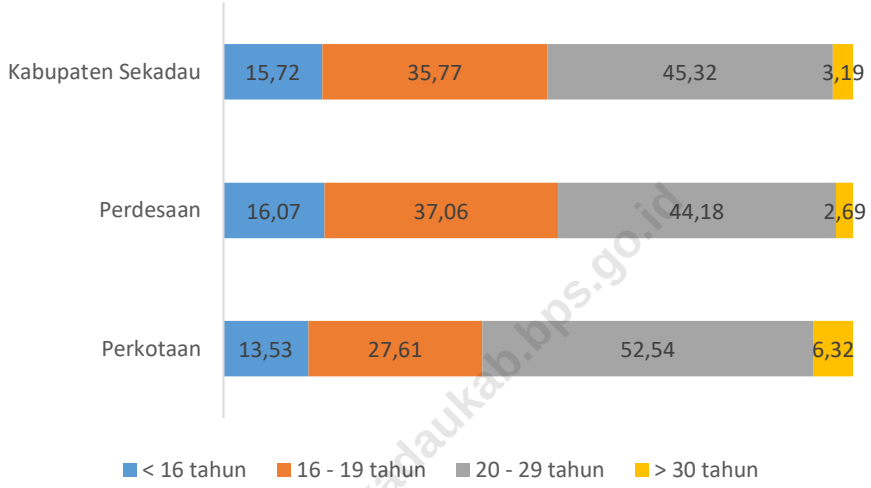

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Selain memengaruhi fertilitas, umur pada saat perkawinan pertama juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Seorang wanita cenderung akan mempunyai risiko yang lebih besar ketika melahirkan bila umurnya belum mencapai usia matangnya organ reproduksi, bahkan dapat berujung pada kematian ibu dan atau meninggalnya bayi yang dilahirkan. Di Indonesia, salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah masih tingginya persentase usia perkawinan pertama di usia muda yang dilakukan penduduk perempuan, yang pada akhirnya juga berdampak negatif terhadap masa reproduksi wanita (Indrayani dan Syafii, 2012)

Gambar 1 di atas menunjukkan mayoritas perempuan pernah kawin di Kabupaten Sekadau melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia yang cukup matang, yaitu pada usia 16 tahun ke atas. Apabila dicermati menurut status daerahnya maka terlihat perbedaan cukup jauh persentase penduduk yang melangsungkan perkawinan pertama usia 16 - 19 tahun yaitu 37,06 persen di daerah perdesaan dan 27,61 persen di daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kecenderungan untuk menikah di usia 16 - 19 tahun lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yang tinggal di daerah perkotaan.

Adioetomo (1984) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dari sisi kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, perempuan yang melangsungkan perkawinannya pada usia kurang dari 17 tahun memiliki 30 persen lebih tinggi risiko kematian ibu hamil, saat bersalin dan nifas dibandingkan dengan perempuan yang kawin pada usia 20 tahun ke atas. Hasil penelitian tersebut apabila dikaitkan dengan gambar di atas maka tidak sampai separuh penduduk perempuan yang pernah kawin di Kabupaten Sekadau yang aman dalam menghadapi proses reproduksinya. Sedangkan sisanya, masih diperlukan perhatian lebih, misalnya dengan cara mensosialisasikan reproduksi sehat ke masyarakat atau menyiapkan sarana prasarana medis yang memadai pada saat perempuan yang terkena risiko tersebut menjalani persalinan dan masa setelahnya. Untuk kajian ini akan dilakukan pada bab lima.

Kelemahan lain dari perkawinan usia muda (19 tahun ke bawah) adalah berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangganya. Pada umumnya, pasangan usia tersebut belum memiliki sumber ekonomi yang

https://sekadaukab.bps.go.id

mapan sehingga dibutuhkan usaha yang lebih untuk menghidupi keluarganya yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kesehatan bahkan kematian yang dialami oleh keluarga pasangan tersebut.

Sehingga sewajarnya perkawinan pertama seharusnya dilakukan ketika usia perempuan telah memasuki kematangan fisik dan mental. Kematangan fisik perempuan dan reproduksi sehat adalah pada usia 20-30 tahun, dan semakin pendeknya masa reproduksi maka tingkat fertilitas cenderung akan menurun. Sedangkan dari sudut kesiapan mental, pada usia tersebut perempuan cenderung mempunyai bekal mental yang lebih baik, misalnya: lebih mapan dalam hal ekonomi, dan lebih matang dalam memecahkan berbagai persoalan rumah tangga. Perihal tersebut pada gilirannya akan membawa dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Umur perkawinan pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial ekonomi diantaranya: agama, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Suradji (1979) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa umur perkawinan pertama sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang.

Pernyataan ini juga didukung oleh Singarimbun (1988) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa perkawinan pertama yang dilangsungkan penduduk perempuan pada umur yang relatif lebih tua (20-30 tahun) cenderung berpendidikan tinggi dan lebih banyak pengetahuannya tentang kesehatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang cukup dominan untuk menunda usia perkawinan pertama adalah pendidikan. Tabel 6 menunjukkan bahwa pada saat perempuan sudah menamatkan

https://sekadaukab.bps.go.id

jenjang pendidikan tinggi (SMA dan perguruan tinggi) cenderung mengalami penundaan pernikahan dengan umur perkawinan pertama lebih dari 20 tahun dengan persentase di atas 70 persen. Akan tetapi hal yang cukup unik terjadi bagi perempuan yang tamat SD/sederajat, mereka juga sebagian besar menunda pernikahannya di atas usia 20 tahun dengan total persentase lebih dari 38 persen.

Apabila hanya memperhatikan data di atas maka sebenarnya penelitian sebelumnya relatif terbukti karena dapat terlihat sebagian besar perempuan yang menunda perkawinannya hingga umur 20 tahun keatas memiliki ijazah lebih tinggi dari SD. Akan tetapi dengan tingginya juga persentase perempuan yang tamat SD/sederajat yang menunda perkawinannya hingga usia 20 tahun keatas menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dipelajari.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 6.
Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Umur Kawin Pertama	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<16 tahun	16,37	21,81	11,97	4,96	0,00
16-19 tahun	37,19	37,68	41,80	30,15	5,03
20-29 tahun	44,39	38,83	43,79	57,68	80,07
≥ 30 tahun	2,05	1,68	2,44	7,21	14,90
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

Penjelasan yang cukup logis dari kondisi ini adalah bahwa pada tahun 2021, secara rata-rata perempuan di Kabupaten Sekadau sudah cukup memahami akan pentingnya kematangan dalam perkawinan dan kesehatan reproduksi. Hal ini mengakibatkan mereka memutuskan untuk menunda pernikahannya. Kondisi ini juga sebagai bukti bahwa kampanye akan kesehatan reproduksi yang dilakukan pemerintah mulai menampakkan hasilnya.

3.5 Pemakaian Alat Kontrasepsi

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah pertambahan penduduk yang mulai tidak terkendali. Tujuan utama dari KB adalah tercapainya suatu masyarakat sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah penduduk sekaligus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Salah satu cara dalam upaya pengendalian kelahiran adalah melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran melalui alat kontrasepsi.

Secara teoritis pengendalian kelahiran akan membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada keluarga kecil, pendapatan keluarga akan terbagi oleh lebih sedikitnya anggota rumah tangga. Selain itu, jika tidak dilakukan pengendalian jumlah anak yang dilahirkan dengan sungguh-sungguh, beban keluarga yang sangat erat kaitannya dengan pendapatan cenderung akan menjadi lebih berat. Pada akhirnya, tujuan untuk membentuk pola keluarga kecil bahagia dan sejahtera akan sulit tercapai. Alat kontrasepsi yang umumnya dipakai

https://sukadaukab.bps.go.id

oleh para akseptor KB antara lain berupa: Medis Operasi Wanita (MOW)/tubektomi, Medis Operasi Pria (MOP)/vasektomi, AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) atau IUD, suntikan, susuk, pil KB, kondom (kondom pria atau wanita) dan cara tradisional lainnya seperti: metode pantang berkala/kalender, jamu dan sebagainya.

Gambar 2.
Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Pernah Kawin Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

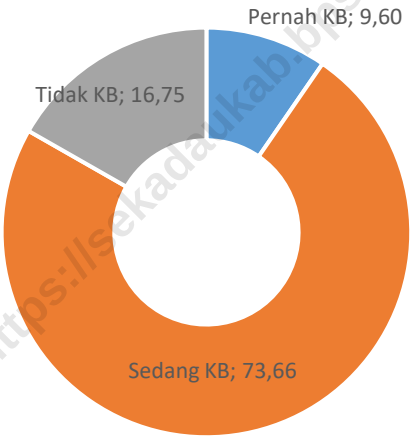

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar wanita usia subur (WUS) yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Sekadau yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi yakni sekitar 73,66 persen. Sedangkan 9,60 persen di antaranya sudah tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi lagi, serta sisanya yang 16,75 persen tidak pernah

menggunakan alat/cara kontrasepsi. Persentase penggunaan alat kontrasepsi tersebut cukup tinggi mengingat sekitar 83 persen WUS pernah menggunakan kontrasepsi. Adanya penggunaan kontrasepsi ini mendukung kebijakan pemerintah terhadap Program Keluarga Berencana guna menekan ledakan penduduk.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2021 terjadi peningkatan penggunaan alat kontrasepsi sekitar 13 persen (tahun 2020 sekitar 60 persen yang sedang menggunakan). Kondisi ini menunjukkan kebijakan pemerintah terkait Program Keluarga Berencana berjalan dengan baik.

Selanjutnya, dari perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut, ditemukan bahwa hampir semuanya menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan proporsi sekitar 98,93 persen. Secara lebih rinci, untuk alat kontrasepsi modern yang paling populer digunakan pda tahun 2021 adalah suntik dan pil dengan persentase perempuan yang menggunakan adalah sekitar 64,75 persen dan 27,10 persen. Banyaknya akseptor KB yang memilih kedua alat kontrasepsi tersebut diduga disebabkan oleh faktor kemudahan dalam mendapatkannya serta praktis dalam penggunaannya. Kedua jenis alat kontrasepsi tersebut mudah diperoleh di Pukesmas, Poliklinik, petugas KB, Posyandu setempat, dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang menarik dari metode kontrasepsi yang digunakan adalah masih adanya perempuan yang menggunakan metode menyusui alami, yaitu sekitar 0,71 persen dan metode lainnya sekitar 0,36 persen dari total pengguna alat kontrasepsi. Uraian di atas dapat dilihat lengkap pada Gambar 3 berikut ini.

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 3.
Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin
Menurut Jenis Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 (Persen)

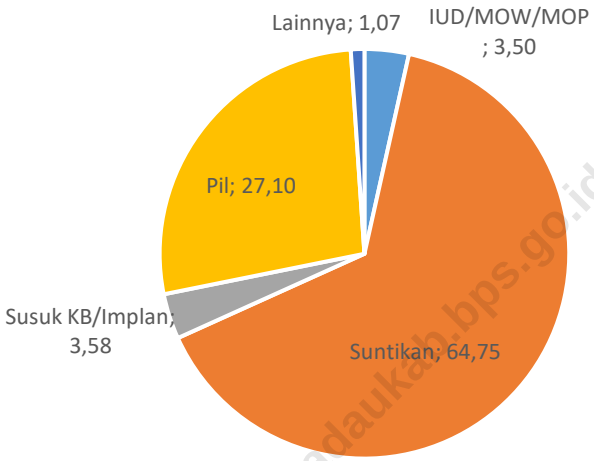

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Uraian pada bab 2 dan bab 3 menjelaskan kondisi kesejahteraan sosial yang ditinjau dari sisi kependudukan. Pada bab-bab berikutnya akan disajikan kondisi kesejahteraan sosial diukur dari aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan perumahan) maupun dari aspek ekonomi (ketenagakerjaan dan pengeluaran konsumsi masyarakat).

BAB IV

PENDIDIKAN

https://sekadaukab.bps.go.id

Bab IV
Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, akan cenderung lebih mudah untuk menerima dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi yang mereka terima, yang pada akhirnya akan mengembangkan perekonomian masyarakatnya dan tidak selalu bergantung kepada alam. Dengan demikian, masyarakat dengan pendidikan yang memadai diharapkan mampu menjadi sumber daya yang sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai kesejahteraan.

Sejumlah penelitian mengungkapkan adanya hubungan yang positif antara tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan produktivitas kerja. Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan keahlian profesional dan keterampilan teknis. Tenaga kerja yang ahli dan terampil relatif mempunyai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan tenaga kerja yang terampil, baik, kreatif dan inovatif, serta dapat mendorong gairah kerja yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil yang diterima masyarakat tersebut.

Klasifikasi pendidikan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Secara umum pendidikan formal sangat berpengaruh positif terhadap pasar kerja dibandingkan pendidikan nonformal. Sejauh ini pendidikan formal merupakan prasyarat

https://sekadaukab.bps.go.id

utama dalam memilih bidang pekerjaan yang akan ditekuni, dan pendidikan nonformal hanya bersifat penunjang. Tingkat pendidikan mempunyai korelasi positif dengan tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung meningkatkan peluang mereka untuk kerja ditempat yang layak yang pada akhirnya dapat menerima pendapatan yang lebih tinggi. Untuk itu pada bab ini hanya akan menyajikan data mengenai pendidikan formal yang dienyam oleh penduduk Kabupaten Sekadau.

Tabel 7.
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin
dan Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kelompok Usia Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12 (SD/Sederajat)	11.560	11.539	23.099
13-15 (SMP/Sederajat)	4.191	4.593	8.784
16-18 (SMA/Sederajat)	3.940	5.171	9.111
Penduduk Usia Sekolah	**19.691**	**21.303**	**40.994**

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Pada Tabel 7 di atas terlihat komposisi penduduk usia sekolah dasar dan menengah (7-18 tahun) di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021, berjumlah sebanyak 40.994 jiwa, atau kurang lebih sekitar 20 persen jumlah seluruh penduduknya. Apabila dipilah menurut jenis kelamin,

sebanyak 19.691 jiwa adalah penduduk laki-laki, dan sebanyak 21.303 jiwa penduduk perempuan.

Kemudian apabila dipisahkan berdasarkan jenjang pendidikan maka kelompok usia Sekolah Dasar (SD)/Sederajat (usia 7-12 tahun) sebanyak 23.099 jiwa, kelompok usia Sekolah Menegah Pertama (SMP)/Sederajat (usia 13-15 tahun) sebanyak 8.784 jiwa, dan kelompok usia Sekolah Menegah Atas (SMA)/Sederajat (usia 16-18 tahun) sebanyak 9.111 jiwa. Besarnya komposisi penduduk pada kelompok umur sekolah ini patut menjadi perhatian lebih para pengambil kebijakan terkait bidang pendidikan, yaitu kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan cukup.

Pada bab ini akan disajikan beberapa indikator pendidikan di Kabupaten Sekadau. Indikator yang disajikan akan berupa pendukung bidang pendidikan seperti fasilitas pendidikan dan partisipasi penduduk dalam sekolah dan hasil dari kegiatan bidang pendidikan seperti tingkat pendidikan yang ditamatkan dan kemampuan baca dan tulis.

https://sekadaukab.bps.go.id

4.1 Fasilitas Pendidikan

Ketersedian fasilitas pendidikan merupakan faktor penting yang dapat menunjang peningkatan pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses tentunya memberikan nilai positif bagi pertimbangan masyarakat untuk menge-nyam bangku pendidikan yang lebih tinggi. Tabel 8 di bawah ini menggambarkan fasilitas pendidikan berupa jumlah sekolah, kelas, serta guru yang terdapat di Kabupaten Sekadau tahun 2021.

Tabel 8.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kecamatan	SD	SMP	SMA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanga Mahap	31	9	2
Nanga Taman	36	10	3
Sekadau Hulu	39	14	4
Sekadau Hilir	58	13	11
Belitang Hilir	29	6	2
Belitang	11	4	2
Belitang Hulu	34	7	3
Kabupaten Sekadau	**238**	**63**	**27**

Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 8 menunjukkan bahwa di tahun 2021, tercatat terdapat 238 unit sekolah SD baik negeri maupun swasta, 63 unit sekolah SMP negeri maupun swasta dan 27 unit sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK masing-masing kecamatan telah memiliki fasilitas sekolahnya. Jumlah SD terbanyak terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir dan Kecamatan Sekadau Hulu yakni masing-masing sebanyak 58 unit dan 39 unit SD. Sedangkan kecamatan dengan jumlah SMP terbanyak adalah Kecamatan Sekadau Hulu yakni 14 unit SMP. Kemudian, jumlah SMA/SMK di Kecamatan Sekadau Hilir adalah terbanyak dibandingkan kecamatan lain yakni mencapai 11 unit.

Hal ini mengindikasikan terjadinya pemusatan fasilitas pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di wilayah perkotaan atau ibu kota

kabupaten (Kecamatan Sekadau Hilir). Kondisi ini tentunya dapat mendorong penduduk di luar wilayah ibu kota untuk bermigrasi guna mengenyam/mengejar pendidikan yang lebih tinggi tingkatnya dari yang ada di masing-masing kecamatan asalnya. Dengan demikian, kondisi (migrasi karena sekolah) ini memberikan andil besar terhadap pertambahan penduduk di Kecamatan Sekadau Hilir selama ini.

Selain dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan, hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah kemampuan dari fasilitas-fasilitas tersebut dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan layak bagi masyarakat. Untuk mengukur hal ini, indikator-indikator yang dapat digunakan adalah rasio antara murid-sekolah, rasio antara murid-guru, serta rasio murid-kelas.

https://sekadaukab.bps.go.id

Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar, dan dapat memberikan informasi awal tentang mutu pengajaran di kelas. Rasio murid-kelas menggambarkan banyaknya murid dalam satu kelas atau rombongan belajar. Sedangkan rasio murid-sekolah menggambarkan daya tampung sekolah terhadap murid yang bersekolah. Walaupun belum ada standardisasi tentang besaran ideal indikator ini, namun indikator ini sekurang-kurangnya dapat memberikan informasi awal tentang efektivitas pengajaran di sekolah/kelas.

Pada tahun 2021, rasio murid-guru SD/Sederajat di Kabupaten Sekadau adalah 16 yang memiliki arti setiap seorang guru SD di Kabupaten Sekadau memiliki beban mengajar rata-rata sebanyak 16 orang murid. Rasio murid-guru SMP/Sederajat adalah 15 orang murid per satu guru. Untuk rasio murid-guru SMA/Sederajat adalah sebesar 21 orang murid per satu guru. Dengan demikian, rasio ini masih sesuai

dengan batas yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dalam Permendikbud No.23 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa di setiap sekolah harus menyediakan minimal 1 orang guru untuk setiap 32 muridnya (maksimal).

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan rasio murid-sekolah, maka terlihat bahwa jenjang sekolah SMA mempunyai rasio tertinggi dengan angka 311 murid per sekolah kemudian diikuti jenjang SMP dengan rasio 150 murid per sekolah kemudian yang paling kecil adalah jenjang SD 104 murid per sekolah. Gambaran ini menunjukkan apabila sekolah jenjang SMA tidak mengelola sekolah dengan baik dari sisi guru maupun fasilitas akan menyebabkan ketidakmampuan sekolah untuk mendidik murid-muridnya dengan baik. Gambaran lengkap uraian di atas terangkum dalam Tabel 9 di bawah ini.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 9.
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Sarana/Pra Sarana Pendidikan	SD/SDLB/ MI	SMP/SMPLB/ MTs	SMA/SMK/ MA
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah (Unit)	242	69	29
Guru (Orang)	1.612	689	440
Murid (Orang)	25.220	10.322	9.009
Rasio Murid-Guru	16	15	21
Rasio Murid-Sekolah	104	150	311

Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)

4.2 Partisipasi Sekolah

Untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat digunakan beberapa indikator pendidikan. Misalnya seperti banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah atau angka partisipasi sekolah (APS). Semakin besar indikator ini menunjukkan bahwa semakin baiknya tingkat kesejahteraan rumah tangganya karena terlihat relatif mampu untuk menyekolahkan anggota rumah tangganya. Pada dasarnya APS penduduk usia sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: ketersediaan fasilitas pendidikan, faktor lingkungan, dan sosial ekonomi rumah tangga. Ketersediaan fasilitas pendidikan erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam rangka menyediakan sarana/prasarana pendidikan. Sedangkan faktor sosial ekonomi rumah tangga adalah kemampuan ekonomi para orang tua untuk terus menyekolahkan anak-anaknya yang masuk pada kelompok usia sekolah. Faktor lain yang tidak terukur adalah kemauan orang tua itu sendiri untuk terus menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya.

https://sekadaukab.bps.go.id

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2020 adalah sekitar 8,98 persen, penduduk yang masih sekolah sekitar 25,85 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 65,17 persen. Apabila dilihat per jenis kelaminnya terlihat bahwa penduduk yang tidak/belum pernah sekolah relatif didominasi oleh kaum perempuan yaitu sekitar 12,58 persen, sedangkan peduduk laki-laki hanya sekitar 5,60 persen. Relatif lebih besarnya persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dibanding laki-laki, diduga bukan karena para orang tua lebih mengutamakan pendidikan bagi anak

laki-lakinya dibanding anak perempuan, namun semata-mata karena dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para orang tua terhadap keamanan anak perempuannya khususnya di daerah pedalaman, dimana jarak sekolah dengan tempat tinggal cukup jauh dan belum ditunjang dengan ketersediaan sarana transportasi yang memadai.

Selain itu, terdapat pula perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara persentase penduduk tidak/belum pernah sekolah di daerah perdesaan dan perkotaan. Penduduk tidak/belum pernah sekolah di daerah perkotaan lebih kecil dibandingkan di daerah perdesaan, yakni dengan persentase masing-masing sebesar 0,60 persen di perkotaan, dan 7,98 persen di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan wilayah masih menjadi faktor dominan yang mengakibatkan seseorang untuk tidak bersekolah di Kabupaten Sekadau. Selain itu, hal tersebut dapat menggambarkan adanya perubahan kondisi penduduk di daerah perdesaan ke arah yang lebih baik pada tahun 2018. Adanya perbaikan seperti ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perdesaan sehingga kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan semakin berkurang. Penduduk di daerah perdesaan menjadi lebih mudah dalam mendapatkan akses pendidikan tanpa harus jauh-jauh pergi ke daerah perkotaan. Selain itu, kebiasaan penduduk daerah perdesaan yang cenderung untuk menunda sekolah anak-anaknya karena berbagai alasan seperti: tidak tega membiarkan anaknya yang masih kecil untuk pergi ke sekolah, menginginkan anaknya untuk membantu pekerjaannya, dan karena faktor ekonomi sudah mulai berkurang.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 10.
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas Menurut Partisipasi Sekolah, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		Klasifikasi Wilayah		Kabupaten Sekadau
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah bersekolah	4,22	8,55	2,96	6,87	6,35
Masih bersekolah	22,70	24,17	26,93	22,89	23,42
Tidak bersekolah lagi	73,08	67,28	70,11	70,24	70,23
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam hal pendidikan maka beberapa indikator dapat digunakan, diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM). APS menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APK menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM menggambarkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia

tersebut. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut.

Secara umum, APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sekadau tahun 2021 adalah sekitar 98,76 persen, yang berarti dari sejumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sekadau pada tahun tersebut sebesar 98,76 persen di antaranya masih bersekolah, sedangkan 1,24 persen sisanya masih tidak/belum bersekolah ataupun tidak bersekolah lagi. Seiring bertambahnya usia penduduk, APS-nya cenderung semakin menurun, seperti terlihat pada Gambar 4. APS penduduk usia 13-15 tahun adalah sebesar 89,99 persen, yang berarti pada usia 13-15 tahun sekitar 10,01 persen penduduk sudah tidak mengikuti pendidikan lagi. Pada kelompok usia selanjutnya, sepertiga penduduk usia 16-18 tahun sudah tidak menikmati pendidikan lagi, atau sekitar 31,23 persen.

http://sekadaukab.bps.go.id

Dari ketiga kelompok usia sekolah tersebut, partisipasi pendidikan dari penduduk perempuan cenderung lebih tinggi pada kelompok usia SMP dan SMA dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan kesadaran penduduk perempuan akan pentingnya pendidikan sudah lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki. Namun demikian, biasanya ketika beranjak pada usia 16-18 tahun, ada kecenderungan penduduk laki-laki lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Adanya faktor keterbatasan dari sisi ekonomi, membuat penduduk laki-laki cenderung memilih untuk bekerja ketika dihadapkan dengan pilihan antara pendidikan dan pekerjaan. Gambaran lengkap mengenai APS tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

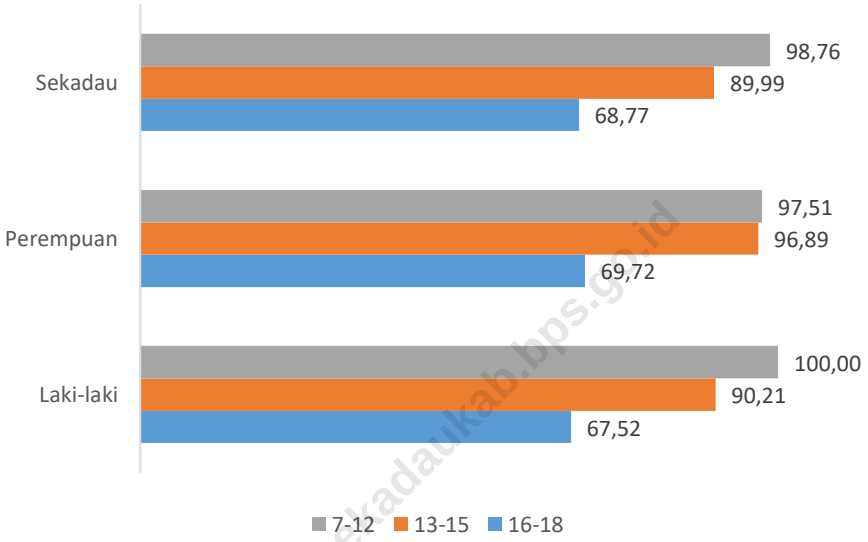

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Selanjutnya di tahun yang sama, APK SD/sederajat bernilai sekitar 113,54 persen yang berarti jumlah penduduk yang sekolah di SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dengan kata lain, terdapat sejumlah penduduk yang masuk SD sebelum usia 7 tahun *(early entry*) ataupun penduduk berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah SD. Fenomena penduduk berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD banyak terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terjadi karena banyak penduduk yang terlambat masuk SD (yang salah satunya dibuktikan oleh besarnya persentase penduduk 5 tahun ke atas yang belum/tidak pernah bersekolah), sehingga penduduk tersebut

juga terlambat lulus SD atau lulus lebih dari usia 12 tahun. Karena itulah, tidak mengherankan jika APK SD baik laki-laki maupun perempuan melebihi angka 100, yakni masing-masing 113,51 persen dan 113,57 persen.

Gambar 5.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

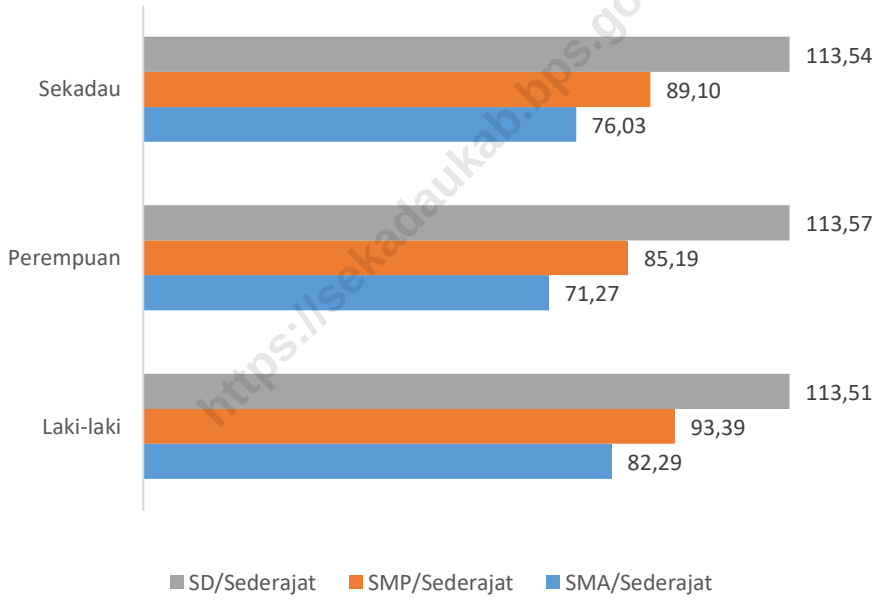

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Di jenjang pendidikan SMP/sederajat, APK tahun 2021 bernilai sebesar 89,10 persen yang berarti jumlah penduduk yang bersekolah di SMP jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Dengan kata lain, proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP lebih kecil dibandingkan dengan total penduduk di kelompok usia 13-15, selain itu, dari sejumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah, sebagian bersekolah bukan di jenjang pendidikan SMP, baik masih bersekolah di SD ataupun sudah memasuki jenjang SMA. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, APK SMP/sederajat laki-laki (sekitar 93,39%) lebih besar dibandingkan APK SMP/sederajat perempuan (sekitar 85,19%). Ini berarti proporsi penduduk yang sedang menduduki jenjang pendidikan SMP/sederajat lebih banyak yang laki-laki dibandingkan perempuan.

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA secara umum APK tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 merupakan APK terendah jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya. Besarnya APK SMA/sederajat adalah sebesar 76,03 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk yang bersekolah di SMA masih lebih kecil dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun. Hal ini disebabkan tidak semua penduduk usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan, selain itu terdapat sejumlah penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan lain selain SMA, misalnya masih bersekolah di SMP atau sudah memasuki jenjang perguruan tinggi. Gambaran lengkap mengenai APK terangkum pada Gambar 5.

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 6.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

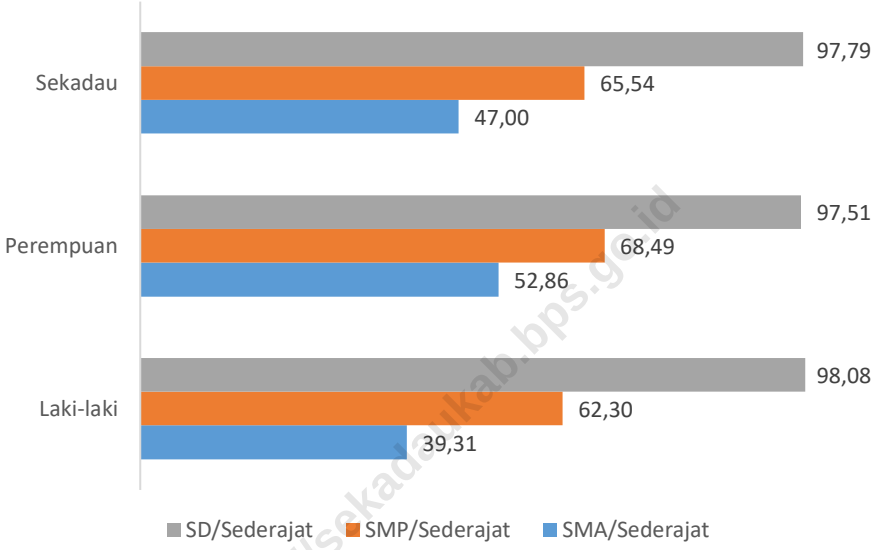

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Indikator selanjutnya adalah APM. Pada tahun 2021, APM di Kabupaten Sekadau menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan APS-nya, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil persentase APM-nya. APM SD yang merupakan APM terbesar dibandingkan APM pada jenjang pendidikan lainnya, memiliki nilai sekitar 97,79 persen, yang berarti di Kabupaten Sekadau tahun 2021 terdapat sekitar 97,79 persen penduduk 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD. Dengan kata lain, hanya sekitar 2,21 persen penduduk usia 7-12

tahun yang masih belum dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, maka untuk laki-laki persentasenya bernilai lebih besar dibandingkan dengan perempuan, yakni 98,08 persen berbanding 97,51 persen. Kondisi tersebut berkebalikan pada jenjang SMA/sederajat. Persentase yang lebih besar justru terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak umur yang cukup, salah satunya alasannya adalah untuk bekerja. Kondisi ini sangat mungkin terjadi, mengingat masih kurangnya kesadaran akan pendidikan sehingga motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Berbeda dengan perempuan yang pada usia tersebut masih terlalu muda untuk bekerja, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap bersekolah.

https://sekadaukab.bps.go.id

4.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin tinggi kualitas dan kemampuan akademis seseorang. Ukuran tingkat pendidikan yang ditamatkan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan penduduk, sehingga dapat diketahui sejauh mana kemajuan di bidang pendidikan berpengaruh terhadap bidang-bidang yang lainnya.

Tabel 11.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Kabupaten Sekadau
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD/ sederajat	25,74	29,28	27,50
SD/sederajat	32,15	35,60	33,86
SMP/sederajat	17,74	15,99	16,87
SMA/sederajat	19,49	15,07	17,30
Akademi/Perguruan Tinggi	4,88	4,06	4,47
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Dari Tabel 11, ternyata pada tahun 2021 sebagian besar kualifikasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Sekadau masih didominasi oleh SD ke bawah (lulus dan tidak/belum lulus SD) yaitu sebesar 61,36 persen, dengan rincian masing-masing 27,50 persen penduduk yang tidak punya ijazah SD/sederajat, dan 33,86 persen penduduk yang tamat SD/sederajat. Kemudian di urutan kedua terbesar ditempati oleh penduduk yang tamat SMA/sederajat yaitu sebesar 17,30 persen. Yang mengkhawatirkan adalah hanya sekitar 4,47 persen penduduk yang tergolong berpendidikan tinggi (tamat D-I ke atas).

Seperti diungkapkan di Bab 2, bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Sekadau adalah tinggal di daerah perdesaan di mana sebagian besar daerahnya cukup sulit dijangkau sehingga cenderung

menyulitkan penduduk untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program wajib belajar (wajar) 9 tahun dan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan perlu terus digalakkan guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sekadau pada masa yang akan datang.

4.4 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar tentang pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan membaca dan menulis dapat dilihat pada data Angka Melek Huruf (AMH). Tinggi rendahnya angka melek huruf mencerminkan pencapaian hasil pembangunan bidang pendidikan tentang pemberantasan buta aksara. Kemampuan membaca dan menulis merupakan sarana dasar untuk dapat menerima dan menyerap berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, maupun informasi.

https://sekadaukab.bps.go.id

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dasar membaca dan menulis yaitu utamanya melalui upaya pemberantasan buta huruf. Hal ini dilakukan agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 7 berikut menunjukkan bahwa di tahun 2021 angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sekadau adalah sebesar 93,27 persen. Apabila ditinjau lebih rinci berdasarkan jenis kelaminnya, maka AMH penduduk laki-laki lebih tinggi daripada AMH penduduk perempuan, yaitu masing-masing sebesar 97,69 persen berbanding 88,72 persen.

Gambar 7.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

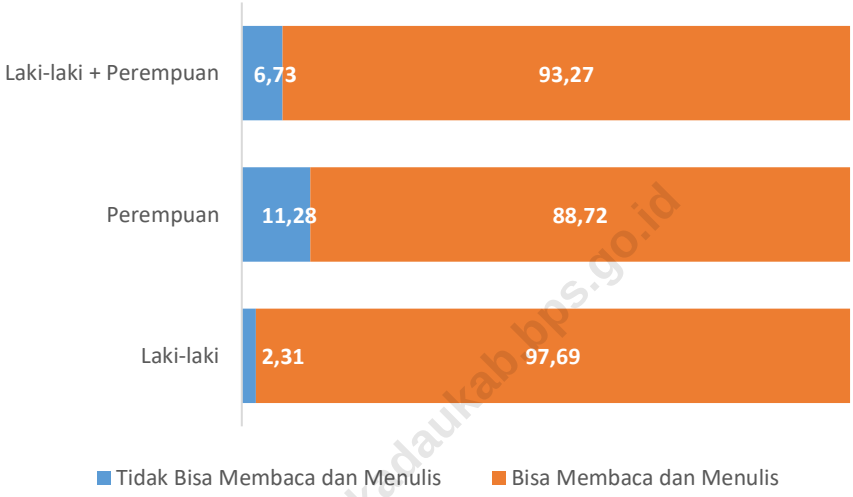

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Untuk menekan tingginya angka buta huruf yaitu sekitar 8,08 persen, kiranya program wajib belajar bagi penduduk usia sekolah, dan program kejar paket A,B dan C bagi penduduk yang tidak mungkin lagi mengikuti pendidikan formal tetap perlu terus digalakkan, serta menjadi program prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Dengan aksi cepat dan terarah, diharapkan tingkat buta huruf dapat ditekan hingga sekecil mungkin, sehingga kualitas hidup masyarakat cenderung menjadi semakin baik seiring dengan peningkatan kualitas SDM masyarakat.

BAB V

KESEHATAN

https://sekadaukab.bps.go.id

Bab V
Kesehatan

Kesehatan memiliki korelasi positif dengan produktivitas kerja. Kondisi kesehatan harus terus dijaga sebaik mungkin, baik melalui kebersihan lingkungan maupun perbaikan gizi keluarga. Jika kedua faktor tersebut kurang diperhatikan akan berisiko terhadap kesehatan, misalnya menjadi cenderung mudah mengalami gangguan kesehatan atau rentan terhadap gangguan berbagai jenis penyakit.

Kemajuan bidang kesehatan termasuk salah satu keberhasilan pembangunan. Pemerintah mengarahkan agar pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat secara mudah, merata dan murah. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik menyangkut kuantitas maupun kualitas. Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap sarana kesehatan, pemerintah mengarahkan agar tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan terus ditingkatkan kualitasnya, kemampuan serta persebarannya. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat juga dilakukan antara lain melalui pencegahan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk mengukur tingkat kesehatan di Kabupaten Sekadau, publikasi ini akan menyajikan indikator berupa sarana kesehatan dan tingkat kesehatan dari penduduk.

https://sekadaukab.bps.go.id

5.1 Sarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan tidak terlepas dari peran serta pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Salah satu point yang penting dalam rangka pembangunan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, dan lain sebagainya. Sebagai unit pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk melayani kesehatan masyarakat di kecamatan ataupun desa/keluharan, puskesmas diharapkan dapat menjangkau dan dijangkau serta dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh penduduk di suatu wilayah.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 12.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Poliklinik	Poskesdes
	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanga Mahap	0	0	1	44	0	16
Nanga Taman	0	0	1	30	1	19
Sekadau Hulu	0	0	2	53	0	17
Sekadau Hilir	1	0	4	64	5	21
Belitang Hilir	0	0	1	27	3	11
Belitang	0	0	1	9	1	10

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Poliklinik	Poskesdes
	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belitang Hulu	0	0	2	26	2	18
Kabupaten Sekadau	**1**	**0**	**12**	**253**	**12**	**112**

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 12 menunjukkan bahwa di tahun 2021 hanya terdapat 1 unit Rumah Sakit Umum (RSU) milik pemerintah yang terletak di Kecamatan Sekadau Hilir. Selain itu, terdapat 12 unit puskesmas dan 253 posyandu, serta 112 poskesdes yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Sekadau. Selain itu terdapat pula 12 unit poliklinik milik swasta yang berlokasi di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Belitang Hilir, dan Kecamatan Belitang.

Berdasarkan fasilitas yang disajikan di atas, maka dapat dihitung rasio sarana kesehatan per 100.000 penduduk adalah sebesar 5,63 untuk puskesmas di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021. Artinya, untuk setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Sekadau terdapat 5 hingga 6 puskesmas yang siap melayaninya jika ada penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Namun, persoalannya; sebaran dan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Sekadau masih jarang (34 jiwa/Km^2 pada tahun 2021), dan tidak/belum meratanya antarwilayah kecamatan apalagi antarwilayah desa. Di sisi lain, sarana dan prasarana transportasi darat umum sangat minim khususnya di wilayah perdesaan (desa

pedalaman), sehingga besaran angka rasio tersebut walaupun cukup tinggi namun tidak/belum mencukupi apabila dikaitkan dengan kemudahan akses seluruh penduduk untuk mendapatkan pelayanan/pertolongan/bantuan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selain fasilitas fisik, ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kecamatan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Secara umum, jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sebanyak 460 orang yang terdiri dari 214 orang tenaga keperawatan, 197 orang tenaga kebidanan, 14 orang tenaga kefarmasian, 22 orang dokter dan 13 orang ahli gizi yang tersebar di seluruh kecamatan. Apabila dipisahkan menurut wilayah kecamatan, maka didapati jumlah tenaga keperawatan terbanyak berada di Kecamatan Sekadau Hilir yakni sebanyak 72 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah sebesar 10 orang tenaga keperawatan di Kecamatan Belitang. Untuk tenaga kebidanan, paling banyak terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir yaitu sebanyak 62 orang bidan dan paling sedikit di Kecamatan Belitang yaitu sebanyak 14 orang bidan.

Untuk menggambarkan keseimbangan jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada, digunakan rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk. Indikator ini menunjukkan berapa banyak petugas kesehatan yang tersedia untuk melayani setiap 10.000 penduduk di wilayah tersebut. Semakin besar rasio ini, dianggap semakin baik kondisi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, karena semakin banyak tenaga kesehatan yang tersedia untuk melayani penduduk setempat ketika mengalami gangguan kesehatan.

https://sekadaukab.bps.go.id

Secara keseluruhan di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021, rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Sekadau per 10.000 penduduk adalah 21,61. Artinya, terdapat 21 hingga 22 tenaga kesehatan di Kabupaten Sekadau yang tersedia untuk melayani setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Sekadau, namun permasalahan sebagaimana telah disebutkan pada fasilitas kesehatan, juga berlaku pada rasio ketersediaan tenaga kesehatan.

Tabel 13.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kecamatan	Dokter (Orang)	Tenaga Keperawatan (Orang)	Tenaga Kebidanan (Orang)	Tenaga Kefarmasian (Orang)	Ahli Gizi (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanga Mahap	1	20	20	1	1
Nanga Taman	2	16	19	1	2
Sekadau Hulu	3	38	34	2	2
Sekadau Hilir	8	72	62	6	6
Belitang Hilir	2	17	20	2	0
Belitang	3	10	14	1	1
Belitang Hulu	3	41	28	1	1
Kabupaten Sekadau	**22**	**214**	**197**	**14**	**13**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau

https://sekadaukab.bps.go.id

5.2 Keluhan Kesehatan Penduduk

Kondisi kesehatan masyarakat merupakan petunjuk keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat cenderung lebih produktif, dan secara bertahap akan terus meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Indikator kesehatan pada dasarnya dibagi dua jenis yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Pada kajian indikator kesejahteraan masyarakat saat ini indikator kesehatan lebih diarahkan pada kondisi kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani yang terjaga dengan baik memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan aktivitasnya semaksimal mungkin, sehingga cenderung lebih produktif. Indikator kesehatan antara lain dicerminkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sakit atau tidak mengalami keluhan kesehatan pada periode pengamatan.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 14.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Merasa Kegiatan Terganggu, Selama Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Jenis Kelamin	Mengalami Keluhan Kesehatan (%)	Merasa Kegiatan Terganggu Karena Keluhan Kesehatan (%)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	19,20	41,38
Perempuan	19,20	37,70
Kabupaten Sekadau	**19,20**	**39,58**

Sumber : Susenas Maret 2021

Berdasarkan data Susenas 2021, diketahui bahwa secara umum terdapat 19,20 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan

dalam periode sebulan yang lalu, di mana 39,58 persen di antaranya merasa terganggu kegiatan sehari-harinya.

Selanjutnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah sama baik perempuan maupun laki-laki yakni sebesar 19,20 persen. Adapun yang merasa terganggu kegiatannya akibat keluhan kesehatan tersebut sekitar 41,38 persen oleh laki-laki, dan sekitar 37,70 persen oleh perempuan,

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan idealnya ditangani oleh tenaga medis agar mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat sesuai dengan keluhan yang diderita. Namun pada kenyataannya, masih banyak penduduk yang lebih memilih untuk mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialaminya, bahkan sebagian juga tidak berobat. Hal ini terutama dialami oleh penduduk di daerah perkotaan.

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 8.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Menurut Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

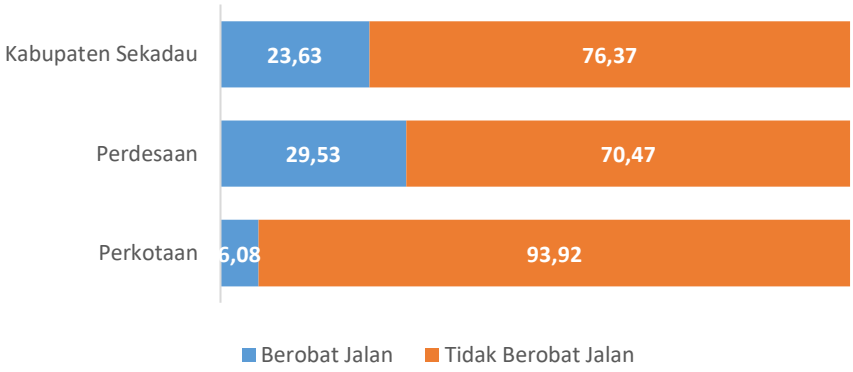

Sumber: Susenas Maret 2021

Secara umum dapat dilihat pada Gambar 8 bahwa sebagian besar (76,37%) penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Sekadau tidak melakukan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kecenderungan penduduk yang biasanya lebih memilih untuk mengobati sendiri serta pola pikir yang merasa tidak perlu untuk melakukan berobat jalan. Selain itu, masalah ekonomi dan keterbatasan fasilitas kesehatan juga mengakibatkan sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menjadi sulit untuk melakukan berobat jalan.

Selain itu, penduduk di daerah perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan berobat jalan ke fasilitas kesehatan yakni sebesar 6,08 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah perdesaan yaitu sebesar 29,53 persen. Hal ini menjadi cukup menarik karena pada umumnya di daerah perkotaan memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan daerah perdesaan. Dengan semakin tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, seharusnya membuat penduduk perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan akan lebih memilih untuk melakukan berobat jalan.

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan memilih untuk melakukan berobat jalan dapat dijadikan informasi awal mengenai pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia, khususnya terkait dengan kemampuan penduduk tersebut dalam memanfaatkannya, baik dari segi kemampuan ekonomi maupun ketersediaan fasilitas itu sendiri.

https://sekabupkab.bps.go.id

Gambar 9.
Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

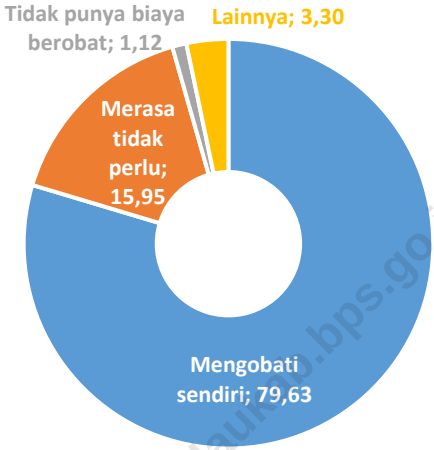

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021 dapat kita ketahui beberapa alasan yang melatarbelakangi penduduk untuk tidak berobat jalan (Gambar 10). Sebagian besar (79,63%) penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan dikarenakan mereka lebih memlih untuk mengobati sendiri. Kemudian alasan utama kedua yaitu karena mereka merasa tidak perlu, atau sekitar 15,95 persen. Hal ini umumnya disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa keluhan kesehatan mereka ringan serta akan sembuh dengan sendirinya seiring dengan perjalanan waktu dan dengan banyaknya istirahat. Alasan yang paling kecil adalah alasan tidak punya biaya berobat (1,12%).

Gambar 10.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut
Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

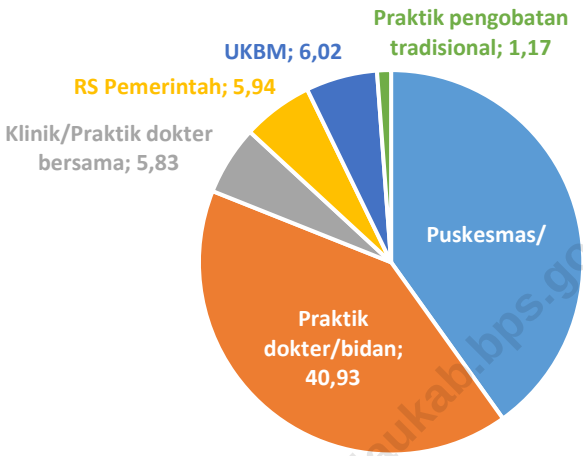

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 10 menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mengobati keluhan kesehatan yang dialaminya. Secara umum, penduduk Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 lebih memilih untuk berobat jalan ke praktik dokter/bidan, atau sekitar 40,93 persen. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat praktik dokter/bidan mudah untuk diakses karena sudah tersebar secara menyeluruh di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sekadau. Informasi menarik lainnya adalah ada sebagian kecil (1,17%) penduduk Kabupaten Sekadau yang mengobati keluhan kesehatan yang dialaminya dengan berobat ke praktik pengobatan tradisional.

5.3 Penolong Persalinan

Salah satu usaha di bidang kesehatan adalah peningkatan proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga medis. Hal ini erat kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang dilahirkan. Ada empat penyakit utama penyebab kematian balita yatu: tetanus neonatal, batuk rejan, campak, dan infeksi akut pada saluran pernapasan bagian bawah (ISPA). Keempat jenis penyakit tersebut disinyalir menjadi penyebab kematian bagi sepertiga anak balita di negara-negara berkembang (Masri Singarimbun, 1988: 301). Tetanus neonatal disebabkan oleh infeksi pada bayi yang baru lahir (biasanya timbul pada tali pusat) karena organisme tetanus. Salah satu faktor penyebab infeksi tetanus adalah oleh siapa pertolongan persalinan dilakukan dan dengan apa tali pusar bayi dipotong.

Pertolongan persalinan dapat dilakukan oleh dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dukun beranak, dan lainnya. Persalinan ditolong oleh tenaga yang tidak terlatih mempunyai kecenderungan resiko tetanus neonatal, karena berkaitan dengan teknik sterilisasi dalam persalinan dan perawatan pusar. Teknik persalinan dan perawatan pusar pada anak yang dilakukan oleh tenaga medis lebih baik dan steril dibandingkan dengan yang lainnya. Ada beberapa dimensi perawatan tali pusar pada bayi yang perlu diperhatikan yaitu: praktek pemotongan tali pusar, membuka dan menyimpul tali pusar, serta bahan yang dioleskan pada pangkal tali pusar yang belum

https://sekadaukab.bps.go.id

kering. Tiga dimensi perawatan tali pusar tersebut apabila tidak steril akan menimbulkan kontaminasi pada bayi.

Gambar 11.
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

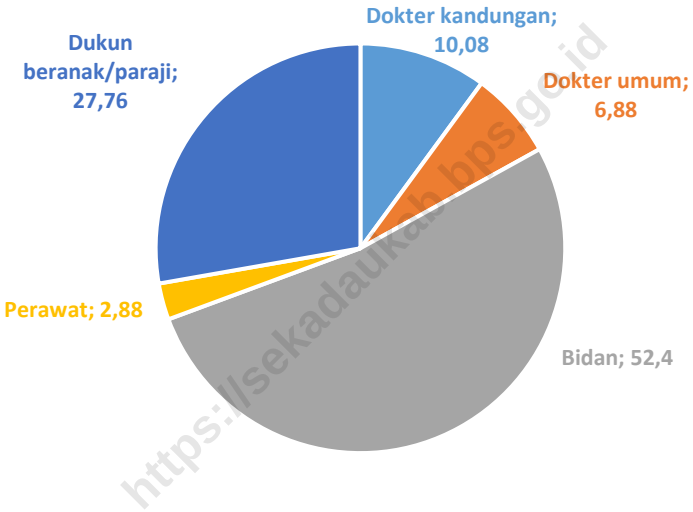

Sumber: Susenas Maret 2021

Pada Gambar 11 terlihat bahwa secara umum proses kelahiran di Kabupaten Sekadau selama dua tahun terakhir lebih banyak ditolong oleh bidan dengan persentase sebesar 52,40 persen, dukun sebesar 27,76 persen, dokter kandungan dengan persentase sebesar 10,08 persen, dokter umum sekitar 6,88 persen, dan perawat sebesar 2,88 persen.

Masih tingginya penolong persalinan secara tradisional mengindikasikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan tenaga medis. Selain itu, faktor sedikitnya jumlah tenaga medis yang berada di daerah perdesaan disinyalir juga dominan menjadi penyebabnya, misalnya dokter/bidan yang pada umumnya hanya terdapat di daerah perkotaan atau di ibukota kecamatan. Selain itu, diduga faktor kebiasaan para ibu yang secara turun temurun terbiasa melahirkan ditolong oleh dukun beranak sewaktu melahirkan juga besar andilnya. Oleh karena itu, wajar bila tenaga dukun bayi masih sangat berperan dan dibutuhkan di wilayah perdesaan di Kabupaten Sekadau.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga medis di semua daerah, khususnya desa-desa terpencil (pedalaman), agar masyarakat dengan mudah dapat menerima pelayanan tenaga medis. Tidak perlu sampai mengesampingkan tenaga dukun bayi yang telah ada, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara keduanya. Misalnya dengan memberikan kursus/pendidikan yang memadai kepada para dukun bayi tentang tatacara yang baik dalam proses menolong persalinan, pemotongan tali pusar, perawatan ibu dan anak setelah persalinan, dan sebagainya dilihat dari standar dasar kesehatan. Dengan demikian, para dukun bayi tersebut menjadi lebih profesional dan paham betul tentang penanganan persalinan yang sehat, aman bagi ibu dan bayinya.

https://sekadaukab.bps.go.id

5.4 Kesehatan Balita

Pada saat bayi berumur kurang dari lima tahun (balita) sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna, sehingga peran orang tua, khususnya ibu sangat menentukan kesehatan balita. Pada kelompok usia ini, biasanya anak akan menuntut perhatian lebih para orang tua terhadap asupan gizi maupun kesehatannya. Hal ini dikarenakan anak yang masih cukup rentan terserang berbagai jenis penyakit ringan seperti: demam, batuk, diare, muntah, campak, cacar air, dan berbagai jenis penyakit ringan lainnya. Secara demografis, kelompok usia ini tergolong pada kelompok yang berisiko kematian tinggi.

https://sekadaukab.bps.go.id

5.4.1 Pemberian ASI

ASI merupakan makanan pokok bagi bayi karena nutrisi dari ASI mengandung hampir 200 unsur zat makanan (Purwanti, 2004). ASI dapat mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Pemberian ASI akan dapat memengaruhi kualitas maupun kelangsungan hidup anak, karena ASI memiliki efek pemberian kekebalan kepada bayi, sehingga ASI mempunyai arti penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, khususnya yang berumur kurang dari dua tahun (baduta). Keadaan gizi yang kurang pada baduta akan menyebabkan lambannya pertumbuhan fisik dan terganggunya perkembangan anak. Pada umur 0-2 tahun ASI merupakan satu-satunya makanan sekaligus minuman sebagai sumber zat gizi yang paling sempurna, karena ASI mempunyai komposisi gizi yang paling lengkap

untuk kebutuhan bayi dan mudah dicerna oleh si-bayi. Komposisi lemak, hidrat arang, protein, garam dan mineral, serta vitamin sangat optimal pada ASI sesuai dengan kebutuhan anak.

Gambar 12.
Persentase Bayi Berumur 0-23 Bulan yang diberi ASI Eksklusif
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

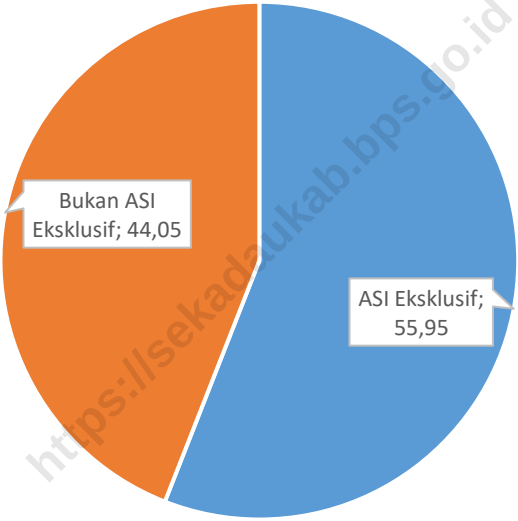

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Selain sebagai sumber gizi utama, pemberian ASI juga dapat bermanfaat bagi psikologis anak. ASI merupakan sumber energi dan protein yang dapat membantu mencegah berbagai jenis penyakit tertentu. Interaksi terhadap sang ibu yang timbul pada saat bayi menyusui akan dapat memberikan rasa aman pada si-bayi. Perasaan aman ini penting untuk mengembangkan dasar kepercayaan diri dengan dimulai mempercayai orang lain/ibu dan akan menimbulkan kepercayaan

diri yang baik. Dengan menyusui, hubungan bayi dengan ibunya juga semakin dekat. Bagi ibu, menyusui akan dapat menjarangkan/menunda kehamilan secara alamiah dan mencegah pendarahan setelah proses persalinan, serta dapat mengurangi risiko kanker payudara.

Berdasarkan Gambar 12, terlihat bahwa persentase bayi usia 0-23 bulan di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 yang diberi ASI eksklusif 55,95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Sekadau yang memiliki bayi belum semuanya memahami pentingya pemberian ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian ASI dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pengetahuan ibu tentang kesehatan dan sosio-kultural
2. Terbatasnya petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan umumnya mengakibatkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan arti pentingnya ASI terhadap bayi dan balitanya
3. Tradisi daerah berpengaruh terhadap pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu awal
4. Tidak lancarnya ASI setelah melahirkan

Untuk itu guna meningkatkan kualitas balita di Kabupaten Sekadau, penyebaran posyandu terutama di daerah perdesaan perlu terus ditingkatkan, guna lebih memasyarakatkan manfaat ASI bagi ibu maupun bayi. Dampak positif dari efektifitas posyandu diantaranya perkembangan bayi dan permasalahan yang timbul, dapat lebih awal diketahui dan diatasi termasuk jika perlu penanganan yang lebih serius.

https://sekadaukab.bps.go.id

5.4.2 Imunisasi

Indikator kesehatan balita yang lain adalah sejauh mana masyarakat sadar akan pentingnya imunisasi, agar anak-anaknya memiliki tingkat kekebalan tubuh yang baik terhadap beberapa penyakit tertentu yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian balita.

Imunisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap berbagai penyakit, sehingga dengan imunisasi diharapkan bayi dan anak tetap tumbuh dalam keadaan sehat (Hidayat, 2008:54). Terdapat berbagai jenis imunisasi yang dianjurkan untuk diberikan kepada anak, diantaranya adalah; BCG, Hepatitis B, polio, DPT, campak, HiB, Pneumokokus (PVC), influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varicella, dan lain-lain. Di Indonesia, terdapat lima jenis imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada anak sejak anak baru dilahirkan (usia 0 bulan) hingga anak berusia 9 bulan, yakni imunisasi BCG (1 kali), DPT (3 kali), polio (4 kali), campak (1 kali), dan Hepatitis B (3 kali).

https://sekadaukab.bps.go.id

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

https://sekdaud.kab.go.id

Bab VI
Ketenagakerjaan

Gambaran keadaan umum ketenagakerjaan antarperiode pencacahan di suatu wilayah tertentu dirancang khusus melalui salah satu survei penting, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Tujuan dari kegiatan Sakernas adalah untuk mendapatkan berbagai indikator ketenagakerjaan bersama dengan perkembangannya untuk tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Sejak tahun 2015, Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Februari untuk menghasilkan estimasi hingga level provinsi dan Bulan Agustus untuk menghasilkan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Pada tahun 2017, pelaksanaan Sakernas pada bulan Agustus sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tidak adanya penambahan sampel untuk memenuhi kebutuhan dasar penyediaan gambaran hingga level kabupaten/kota. Hal ini berimplikasi kepada ketersediaan data ketenagakerjaan yang hanya dapat menyediakan gambaran hingga tingkat provinsi. Namun, ,ulai tahun 2018 pelaksanaan Sakernas pada bulan Agustus kembali lagi seperti pada tahun 2015. Dengan demikian, data ketenagakerjaan pada tahun 2020 dapat dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

https://sekadaukab.bps.go.id

6.1 Angkatan Kerja

Dalam rangka penyelarasan antara pertumbuhan dan pemerataan (*Sustainable Growth with Equity*), pemerintah perlu mempertimbangkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan fokus pembangunan nasional yaitu *Pro-Growth* (pertumbuhan), *Pro-Poor* (pengentasan kemiskinan), *Pro-Job* (penyerapan tenaga kerja), dan *Pro-Environment* (pelestarian lingkungan). Untuk menunjang perencanaan pembangunan Indonesia tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas tersedianya data yang akurat serta *up to date* agar dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan pembangunan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Salah satu peningkatan pemerataan kesejahteraan penduduk tersebut dapat didekati melalui ketenagakerjaan, yakni terfokus pada penyerapan tenaga kerja (*Pro-Job*).

Melalui *Pro-Job*, kesempatan kerja diharapkan dapat tercipta sebanyak-banyaknya sehingga masalah ketenagakerjaan terutama jumlah pengangguran dan setengah pengangguran dapat dikurangi. Semakin tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) maka pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dikatakan semakin baik. Pengangguran dan setengah pengangguran dapat dikurangi dengan meningkatkan kualitas Angkatan Kerja (AK) sehingga kesempatan kerja semakin luas.

https://sekadaukab.bps.go.id

Namun dalam meningkatkan kualitas kerja penduduk tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik dan matang.

Tabel 15.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kegiatan Seminggu yang Lalu	Jenis Kelamin		Kabupaten Sekadau
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	**85,05**	**58,16**	**71,98**
Bekerja	96,80	97,52	97,08
Pengangguran	3,20	2,48	2,92
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Bukan Angkatan Kerja	**14,95**	**41,84**	**28,02**
Sekolah	36,95	13,85	20,19
Mengurus Rumah Tangga	23,81	80,47	64,94
Lainnya	39,24	5,67	14,88
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas Agustus 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Kegiatan seminggu yang lalu di dalam Sakernas dikelompokkan menjadi lima jenis kegiatan utama yaitu bekerja, menganggur, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Bekerja dan menganggur termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya termasuk kelompok bukan angkatan kerja. Berdasarkan Tabel 15, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Sekadau adalah sebesar 71,98

persen, yang berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 71 sampai 72 penduduk yang mampu untuk menghasilkan barang/jasa (bekerja) pada tahun 2021 di Kabupaten Sekadau. TPAK Kabupaten Sekadau yang relatif tinggi ini menunjukan relatif tinggi nya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dalam perekonomian. Selanjutnya, terdapat 28,02 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja.

Jika dilihat dari angkatan kerja tersebut, di Kabupaten Sekadau sebanyak 97,08 persennya telah memiliki pekerjaan, di mana angka ini dapat pula berarti sebagai tingkat kesempatan kerja (TKKd). TKK sebesar 97,08 persen menunjukkan dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat hampir seluruhnya yang bekerja. Melihat kondisi TPAK dan TKK Kabupaten Sekadau tahun 2021 yang relatif tinggi, tentunya sangat baik untuk kegiatan perekonomian, akan tetapi berbeda situasinya jika suatu daerah memiliki TPAK yang tinggi sementara TKK-nya rendah yang berarti meningkatnya pengangguran di daerah tersebut, maka pemerintah harus berusaha menciptakan lapangan kerja.

Tabel 15 menginformasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sekadau sebesar 2,92 persen yang berarti dari 100 penduduk angkatan kerja hanya terdapat sekitar 2 sampai 3 orang yang menganggur.

https://sekadaukab.bps.go.id

6.2 Lapangan Usaha Utama

Lapangan usaha utama penduduk menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan, usaha, perusahaan, atau kantor tempat seseorang bekerja. Secara garis besar, lapangan usaha dikelompokkan menjadi tiga sektor yakni pertanian, manufaktur, dan jasa. Dilihat berdasarkan lapangan usaha utama seminggu yang lalu, mayoritas pekerja di Kabupaten Sekadau bekerja di sektor pertanian, yakni mencapai 64,44 persen. Pada posisi berikutnya, terdapat sektor jasa yang menyerap tenaga kerja sebanyak 24,74 persen. Di sisi lain, sektor dan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sektor manufaktur atau industri pengolahan, yaitu hanya sekitar 10,82 persen.

Selanjutnya Tabel 17 menunjukkan perbedaan jenis lapangan usaha apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin. Dapat terlihat bahwa lapangan usaha utama yang menjadi pilihan (seminggu yang lalu) adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan di mana laki-laki sebesar 61,54 persen dan perempuan 68,89 persen. Hal ini sudah sewajarnya terjadi, mengingat perekonomian Kabupaten Sekadau masih bertumpu pada sektor primer, khususnya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, jenis lapangan usaha manufaktur merupakan kategori yang menyerap tenaga kerja perempuan paling sedikit, yaitu hanya sekitar 2,29 persen. Lebih lanjut, tenaga kerja perempuan juga mendominasi pada sektor jasa pada tahun 2021 di Kabupaten Sekadau.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 16.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Lapangan Usaha Utama	Jenis Kelamin		Kabupaten Sekadau
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	61,54	68,89	64,44
Manufaktur	16,38	2,29	10,82
Jasa	22,08	28,82	24,74
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas Agustus 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

6.3 Status Pekerjaan Utama

Tabel 18 menunjukkan bahwa berdasarkan status pekerjaan utama selama seminggu yang lalu, sebagian besar pekerja di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 berstatus buruh/karyawan/pegawai dengan persentase sebesar 24,74 persen. Kemudian diikuti oleh status berusaha sendiri yaitu sebesar 23,39 persen, sedangkan status pekerjaan utama terkecil persentasenya adalah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu hanya sekitar 3,94 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum begitu banyak pengusaha di Kabupaten Sekadau yang membuka lapangan pekerjaan sendiri (wirausaha) yang mempekerjakan buruh tetap atau dibayar.

Tabel 17.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Kabupaten Sekadau
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	19,93	28,69	23,39
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	24,08	11,68	19,19
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,76	1,15	3,94
Buruh/karyawan/pegawai	31,99	13,60	24,74
Pekerja bebas	9,73	2,11	6,72
Pekerja keluarga/tak dibayar	8,51	42,77	22,02
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas Agustus 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Menurut status pekerjaan utama, dapat diketahui pula persentase pekerja rentan di suatu daerah. Pekerja rentan adalah penduduk yang bekerja yang mempunyai status pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Penghitungan persentase pekerja rentan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase pekerja rentan} = \frac{jumlah\ pekerja\ rentan}{jumlah\ orang\ yang\ bekerja} \times 100$$

Maka, menurut penghitungan tersebut, persentase pekerja rentan di Kabupaten Sekadau berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 52,13 persen artinya sebesar 52,13 persen orang yang bekerja di Kabupaten Sekadau yang tergolong pekerja rentan.

Apabila persentase pekerja rentan Kabupaten Sekadau dibandingkan dengan persentase pekerja rentan Provinsi Kalimantan Barat, maka persentase 52,13 berada di atas persentase Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 55,04 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa pekerja rentan di Kabupaten Sekadau masih lebih baik dibandingkan pekerja rentan Provinsi Kalimantan Barat.

https://sekadaukab.bps.go.id

6.4 Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja penduduk bekerja mampu menggambarkan apakah seseorang termasuk dalam pekerja penuh (≥35 jam) atau setengah pengangguran (<35 jam). Dari gambaran pekerja tersebut dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin dan status daerah.

Pada Gambar 13 menunjukkan bahwa, secara keseluruhan penduduk bekerja di Kabupaten Sekadau sebagian besar jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu (setengah menganggur) yaitu sebesar 58,53 persen. Sedangkan penduduk yang jam kerjanya lebih dari 35 jam atau (bekerja penuh waktu) hanya sekitar 41,47 persen.

Gambar 13.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Jenis Kelamin, dan Status Daerah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

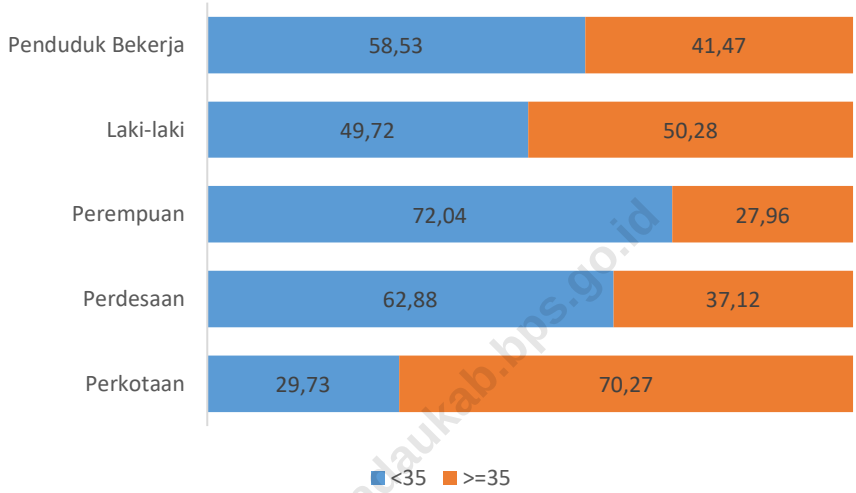

Sumber: Sakernas Agustus 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Jika dilihat berdasarkan status daerah tempat tinggal, penduduk yang tinggal di daerah perdesaan yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu lebih banyak dibanding yang tinggal di perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 62,88 persen dan 29,73 persen.

Kondisi di atas dapat disebabkan oleh mayoritas penduduk di daerah perdesaan bekerja di sektor pertanian yang biasanya mereka tidak bekerja setiap hari, misalnya penoreh karet yang pergi bekerja tergantung oleh faktor cuaca, jika musim hujan berdasarkan pengakuan responden, maka jumlah jam kerja mereka menjadi berkurang atau bahkan tidak pergi bekerja ke kebun. Berbeda di daerah perkotaan dengan lapangan

usaha yang lebih beragam, sektor usaha yang menuntut jam kerja tertentu per harinya akan menambah jumlah jam kerja per minggu seseorang.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu memiliki persentase yang lebih besar daripada penduduk laki-laki yaitu masing-masing sebesar 72,04 persen dan 49,72 persen. Kondisi ini dapat disebabkan perempuan juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, mayoritas penduduk perempuan di Kabupaten Sekadau bekerja untuk membantu kepala rumah tangga dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar.

https://sekadaukab.bps.go.id

6.5 Pendidikan Pekerja

Tingkat pendidikan dapat dijadikan bahan evaluasi yang digunakan untuk melihat kualitas dari tenaga kerja. Tingkat pendidikan dapat dijadikan dasar bagi perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan dalam sistem penggajian maupun pengupahan. Semakin rendah tingkat pendidikan pekerja maka tingkat gaji atau upah yang akan diterima terkadang akan semakin murah, menganggap variabel lainnya sama (seperti jam kerja, kualitas kerja, dan lain-lain).

Gambar 14.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

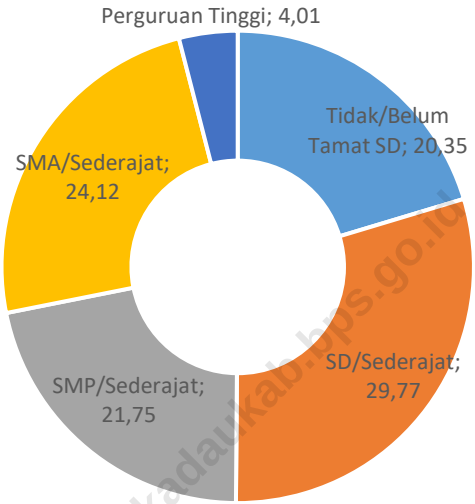

Sumber : Sakernas Agustus 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2021, masih banyak terdapat tenaga kerja yang hanya menamatkan pendidikan tertinggi di bawah SMP/sederajat. Dengan uraian sebagai berikut, tenaga kerja dengan kualifikasi tidak tamat SD dan maksimal tamatan SD/sederajat mendominasi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sekadau yaitu sebesar 50,12 persen, kemudian diikuti oleh tenaga kerja yang tamat SMA/sederajat dan SMK dengan persentase sekitar 21,75 persen. Sedangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi hanya ditamatkan oleh sekitar 4,01 persen tenaga kerja di Kabupaten Sekadau. Dari tahun ke tahun, tenaga kerja yang mampu menamatkan

perguruan tinggi memang selalu menempati posisi terendah untuk proporsi tenaga kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan.

Melalui Gambar 14, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa belum banyak tenaga kerja di Kabupaten Sekadau yang menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun, yaitu sebesar 50,12 persen yang pendidikan tertingginya di bawah SMP/sederajat. Kondisi ini sebaiknya menjadi peringatan bagi pemerintah, agar meningkatkan kembali kualitas penduduknya dari bidang pendidikan, supaya penduduknya dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan menerima hasil yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka.

https://sekadaukab.bps.go.id

6.6 Sektor Lapangan Usaha Utama

Secara umum **sektor informal** dapat dikelompokkan dalam tiga golongan:

1. Pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, dan pedagang keliling.
2. Pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Biasanya mereka bekerja harian. Golongan ini termasuk buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah harian atau bulanan. Pembantu rumah tangga dan buruh bangunan termasuk golongan ini.
3. Pemilik suatu usaha yang sangat kecil. Termasuk dalam kelompok ini para petani kecil dengan mempekerjakan satu atau

beberapa buruh tani. Contoh lain adalah pemilik kios kecil dengan mempekerjakan seorang pembantu.

Tabel 18.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Sektor Formal/Informal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi	Sektor		Total
	Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD	9,92	22,50	19,98
SD / Sederajat	18,75	30,07	27,80
SMP/ Sederajat	18,15	26,04	24,46
SMA/ Sederajat	42,09	19,53	24,05
Perguruan Tinggi	11,09	1,86	3,71
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Sakernas Agustus 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Berdasarkan Sakernas 2021, pekerja yang bekerja di sektor formal sekitar 20,04 persen dan sisanya 79,96 persen di sektor informal. Tabel 18 menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Di sektor formal, persentase penyerapan tenaga kerjanya cenderung semakin tinggi dengan semakin tingginya jenjang pendidikan tenaga kerja tersebut. Sedangkan di sektor informal, persentase penyerapan tenaga

kerjanya cenderung semakin tinggi dengan semakin rendahnya jenjang pendidikan tenaga kerja.

Sektor formal dengan syarat kualifikasi tertentu menunjukkan paling banyak menyerap pekerja lulusan SMA/sederajat (42,09%), kemudian tingkat SD/sederajat lalu diikuti tingkat SMP/sederajat. Berbeda dengan sektor formal, sektor informal paling banyak menyerap lulusan SD/sederajat (30,07%) dan sangat kecil menyerap tenaga kerja yang berlatar belakang lulusan perguruan tinggi (1,86%). Sektor formal cukup menjanjikan dan memiliki gengsi tersendiri dalam dunia kerja, maka semakin tinggi pula latar belakang pendidikan yang mengisinya.

https://sekadaukab.bps.go.id

BAB VII

PERUMAHAN

https://bekasikukabkab.bps.go.id

Bab VII
Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan utama di samping pangan dan sandang bagi setiap penduduk. Perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Selain itu, keadaan perumahan juga mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting pula terhadap produktivitas kerja seseorang. Dengan demikian, keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi. Tetapi di lain pihak, kemampuan untuk merealisasikan perumahan yang layak huni tentunya tergantung pada daya-mampu si penghuni dan perkembangan ekonomi.

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang masih berpenghasilan rendah. Kegiatan pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman memegang peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pembangunan di atas, sasaran dari pembangunan itu adalah tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman yang semakin layak dan terjangkau baik dari sisi jumlah maupun kualitas, serta terciptanya suasana kehidupan pemukiman yang memberikan rasa aman dan tentram. Selain itu, kondisi tempat tinggal dan kesehatan lingkungan perumahan juga perlu diperhatikan karena dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup kesehatan penghuninya.

https://sekadaukab.bps.go.id

Kondisi fisik dan lingkungan sekitar perumahan merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kondisi fisik perumahan dan lingkungannya akan semakin sehat dan sejahtera masyarakat tersebut. Perumahan yang sehat adalah perumahan yang memenuhi persyaratan layak, seperti: kesehatan, keamanan dan keindahan. Persyaratan ini jika terpenuhi akan mempunyai dampak positif terhadap kesehatan lingkungan, oleh karenanya antara perumahan dan lingkungan sekitar merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ukuran rumah dan lingkungan yang sehat dapat dilihat dari beberapa segi antara lain kondisi fisik perumahan dan fasilitas yang ada. Kondisi fisik adalah kondisi bangunan seperti: atap, lantai, dan dinding. Sedangkan fasilitas perumahan meliputi penerangan, dan fasilitas lain yang terkait dengan aspek kesehatan lingkungan.

https://sekadaukab.bps.go.id

7.1 Kepemilikan Rumah

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap individu atau rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh, dimana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah layak huni dengan mudah.

Gambar 15.
Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

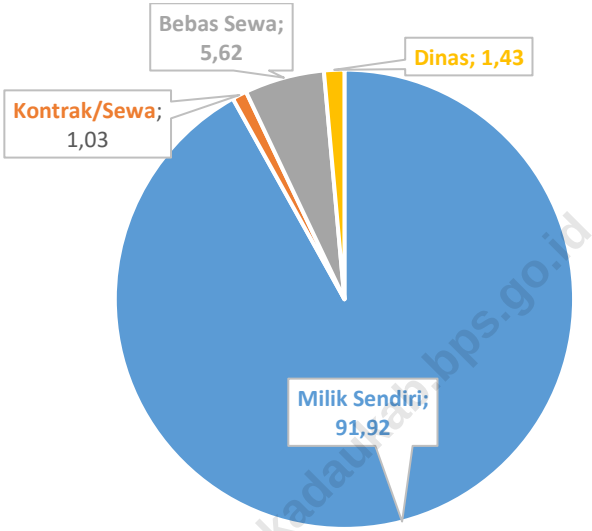

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Menurut data hasil Susenas Maret 2021, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sekadau yang menempati rumah milik sendiri dengan persentase sebesar 91,92 persen, sisanya 8,08 persen merupakan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri, dengan rincian terdiri dari 5,62 persen menempati rumah bebas sewa milik orang lain, sebesar 1,43 persen menempati rumah dengan status kontrak/sewa, dan 1,03 persen dengan status rumah dinas.

Tingginya status kepemilikan rumah sendiri menunjukkan masih banyaknya penduduk asli yang bermukim di daerah tersebut. Hal ini

didukung dengan persentase tertinggi kedua yaitu tempat tinggal dengan status kepemilikan bebas sewa yang biasanya adalah milik orangtua/sanak/saudara, artinya tempat tinggal yang ditempati sudah secara turun temurun pemakaiannya. Semakin banyak penduduk asli yang bermukim di suatu daerah, semakin kental kultur yang ada di daerah tersebut.

7.2 Luas Lantai

https://sekadaukab.bps.go.id

Kualitas sebuah rumah salah satunya dapat diukur dari luas lantai. Luas lantai adalah luas bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga (ART) dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Luas lantai per ART dapat menggambarkan tingkat kepadatan hunian tempat tinggal. Semakin besar ukuran luas lantai per ART menunjukkan kondisi positif tentang tingkat kesejahteraan, karena ruang gerak setiap ART semakin leluasa.

Pada umumnya kualitas rumah berbanding lurus dengan luas lantai. Artinya, semakin baik kualitas rumah biasanya luas lantainya juga cenderung semakin besar. Sering dijumpai bahwa ketika rumah tangga memperluas lantai, maka kualitas rumah juga ditingkatkan, sehingga ada korelasi positif antara kualitas rumah dengan luas lantai (BPS, 2011).

Luas lantai per ART mencerminkan kepadatan tingkat hunian tempat tinggal. Semakin besar ukuran luas lantai per ART, kondisi ini juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang semakin baik, karena ruang gerak ART cenderung semakin leluasa. Ditinjau dari sudut kesehatan luas lantai minimal per ART adalah 10 meter persegi (m^2). Tingkat hunian yang

rata-ratanya kurang dari 10 m² per ART cenderung dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan penghuninya seperti: infeksi penyakit kulit dan penyakit menular lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalensi penyakit dapat diakibatkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat higiene perorangan, kepadatan hunian tempat tinggal atau luas hunian per kapita yang tidak memenuhi syarat kesehatan yakni jika kurang dari 10 m² (WHO, 1975).

Gambar 16.
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

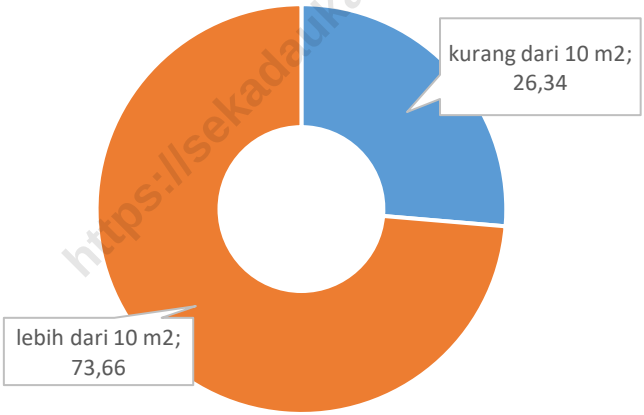

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Berdasarkan Gambar 16 terlihat bahwa rumah tangga di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 yang memiliki luas lantai per ART yang kurang dari 10 m² masih cukup besar persentasenya yaitu sekitar 26,34 persen.

Sedangkan rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai minimal 10 m^2 per ART-nya sekitar 73,66 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekitar seperempat rumah tangga di Kabupaten Sekadau memiliki luas lantai perumahan yang belum sesuai dengan kapasitas jumlah penghuninya, sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal ini. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau yang kecil, yang mengindikasikan masih banyak lahan yang bisa digunakan, kondisi ini mengindikasikan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Sekadau belum untuk sektor perumahan ataupun mungkin sudah menjadi budaya/kebiasaan di Kabupaten Sekadau untuk hidup bersama dalam satu rumah lebih dari satu keluarga. Namun demikian, untuk mengidentifikasinya diperlukan riset lebih lanjut perihal kondisi ini.

https://sekadaukab.bps.go.id

7.3 Jenis Lantai

Jenis lantai yang dipergunakan rumah tangga di setiap daerah tidak dapat dijadikan ukuran perbandingan kualitas rumah karena perbedaan persepsi masyarakat. Di Pulau Jawa rumah yang dianggap baik jika menggunakan lantai tegel/teraso, sedangkan di Kalimantan lantai kayu jenis tertentu (ulin/belinan) justru yang dianggap baik kualitasnya.

Gambar 17 menunjukkan mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sekadau menggunakan jenis lantai bukan tanah yaitu sebesar 99,50 persen, sedangkan sisanya adalah menggunakan lantai jenis tanah. Jenis lantai utama bukan tanah yang umum digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau adalah jenis kayu/papan, yakni dengan persentase

sekitar 50,00 persen. Sedangkan, yang paling sedikit digunakan adalah jenis lantai parket/vinil, atau sekitar 0,18 persen pada tahun 2021.

Dilihat dari sisi kesehatan, jenis lantai tanah kurang baik bagi penghuninya, karena uap tanah dapat langsung terhirup khususnya pada malam hari. Selain itu, tingkat kelembaban udara di daerah Kalimantan pada umumnya tergolong cukup tinggi. Pada umumnya model rumah masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah rumah panggung, maka besarnya persentase lantai bukan tanah tidak serta merta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena sebagian besar lantai rumah panggung adalah menggunakan bahan kayu/papan.

https://sekadaukab.bps.go.id

Gambar 17.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

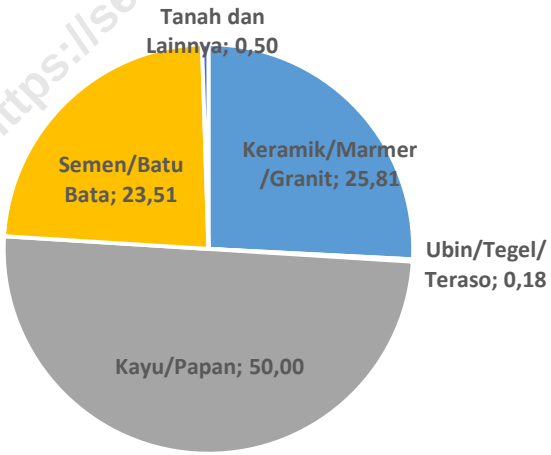

Sumber: Susenas Maret 2021

7.4 Jenis Dinding

Pada dasarnya kualitas bangunan rumah dapat dinilai dari jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk lantai, dinding dan atap. Kualitas rumah menurut klasifikasinya dibedakan menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu :

1. Permanen adalah kelompok rumah yang mempunyai lantai ubin/tegel/ teraso, semen batu merah/kayu, berdinding bata/tembok dan berlantai beton/kayu, dan beratap beton/kayu/seng atau genteng.
2. Semi permanen adalah kelompok rumah yang mempunyai kualitas dinding bata/tembok atau kayu, berlantai ubin/tegel/semen/ batu merah/tanah atau lainnya, serta beratap seng/genteng/beton atau kayu.
3. Tidak Permanen adalah kelompok rumah yang mempunyai kualitas selain dari pada rumah permanen dan non permanen.

https://sekadaukab.bps.go.id

Jenis dinding rumah terbanyak di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah dari bahan tembok/plesteran bambu atau kawat yaitu sekitar 68,81 persen, dan jenis dinding dari kayu/papan sekitar 31,19 persen. Dengan demikian, secara umum jika dilihat berdasarkan jenis dindingnya saja, sebagian besar dinding rumah yang ditempati oleh rumah tangga di Kabupaten Sekadau adalah jenis rumah berkualitas permanen dan semi permanen. Dengan kata lain, jenis dinding rumah yang banyak digunakan rumah tangga di Kabupaten Sekadau relatif telah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya yang

diharapkan juga baik. Gambaran jenis dinding rumah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 18.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

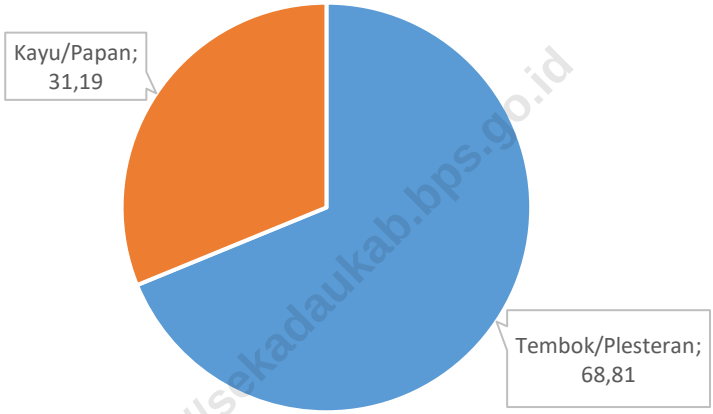

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Namun demikian, kondisi ini tidak dapat dijadikan indikasi secara tunggal. Dinding rumah setiap daerah tidak dapat diperbandingkan karena masih adanya faktor persepsi atau budaya masyarakat yang berbeda. Di Kabupaten Sekadau pada umumnya masyarakat menggunakan dinding kayu dari berbagai jenis bahan maupun kualitas, yaitu sebagian berkualitas baik dan sebagian lagi berkualitas kurang baik (rendah). Sehingga banyaknya penggunaan dinding bahan kayu belum dapat mencerminkan kualitas rumah yang buruk. Sisi lain, penggunaan semen bisa dijadikan bentuk determinan kualitas rumah.

7.5 Jenis Atap

Kualitas atap rumah yang baik biasanya menggunakan bahan-bahan tahan lama seperti; beton, kayu/sirap, seng/asbes dan genteng. Jenis atap yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Sekadau adalah atap seng/asbes yaitu sebesar 94,54 persen dan bahan atap beton/genteng sekitar 2,44 persen.

Gambar 19.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah Terluas
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

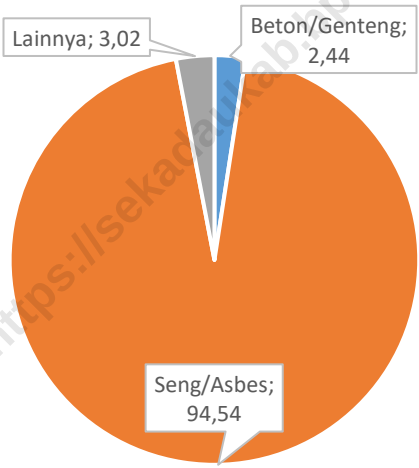

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Selain itu, masih terdapat 3,02 persen rumah tangga yang menggunakan jenis atap lainnya, seperti ijuk/daun-daunan/rumbia. Rumah tangga yang menggunakan jenis atap dari bahan daun-daunan mencerminkan kriteria rumah yang tidak permanen, karena jenis atap

Jerami/Ijuk

tersebut relatif rendah kualitasnya, tidak tahan lama, dan harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan atap rumah jenis lainnya, serta identik dengan kekumuhan dan keterbatasan ekonomi penghuninya.

7.6 Sumber Penerangan Utama

Jika sumber penerangan listrik telah dapat menjangkau seluruh daerah, maka jenis penerangan yang digunakan rumah tangga dapat dijadikan indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga secara langsung. Karena jenis penerangan yang dipakai dalam rumah tangga mempengaruhi mutu kehidupan penghuninya. Dengan demikian, rumah tangga yang menggunakan penerangan dari sumber listrik mendapat kriteria positif tingkat kesejahteraannya. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan dari listrik berarti rumah tangga di daerah tersebut semakin sejahtera.

Gambar 20 menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga di Kabupaten Sekadau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan yaitu sekitar 89,50 persen, di mana sekitar 68,55 persen sumber listrik berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan sekitar 20,95 persen yang bersumber dari listrik Non-PLN. Listrik Non-PLN umumnya diakses oleh rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan, yakni sekitar 24,16 persen dari seluruh rumah tangga di daerah perdesaan.

Gambar 20.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Rumah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

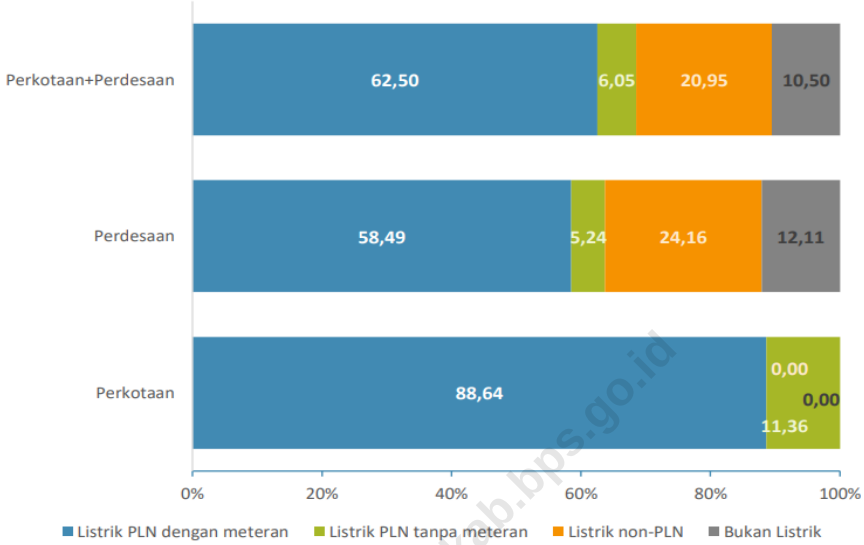

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan tanpa listrik persentasenya masih cukup tinggi yaitu sekitar 10,50 persen. Rumah tangga pengguna sumber penerangan non-listrik ini umumnya lebih banyak dijumpai di daerah perdesaan, yakni sebesar 12,11 persen. Diduga belum meratanya pelayanan fasilitas listrik di Kabupaten Sekadau membuat warga masih harus menggunakan penerangan bukan listrik seperti pelita/sentir/obor, meskipun tidak jarang masyarakat tersebut merasa kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah yang harganya relatif mulai tinggi dan semakin sulit dijumpai.

7.7 Sumber Air Minum Utama

Air minum merupakan salah satu kebutuhan vital bagi segenap makhluk hidup. Bagi manusia khususnya yang terkait dengan aspek perumahan, air digunakan untuk masak/minum dan mandi/cuci. Sehingga tuntutan terhadap air tidak sebatas pada upaya pemenuhan kebutuhannya, melainkan juga dibutuhkan air yang bersih dan higienes.

Air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan utamanya sangat ditentukan oleh sumbernya. Sumber air minum yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Sekadau cukup beragam yaitu: bersumber dari sumur terlindung, mata air, air hujan, air sungai, dan sebagainya. Sejauh ini pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih didominasi oleh air sungai, air hujan, serta mata air terlindungi. Gambar 21 menunjukkan bahwa sekitar 29,84 persen rumah tangga menggunakan air permukaan (sungai/danau/waduk/kolom/irigasi), sekitar 20,12 persen menggunakan air hujan, dan sekitar 18,79 persen menggunakan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga sehari-harinya pada tahun 2021.

Berdasarkan data Susenas Maret 2021, masih cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Keadaan ini menunjukkan indikator yang kurang baik terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Konsumsi air sungai sebagai sumber air minum kurang baik untuk kesehatan karena kebersihannya kurang terjamin, apalagi bila dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat yang juga memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinja, mandi, cuci piring, dan kegiatan rumah tangga lainnya, dimana

https://sekadaukab.bps.go.id

persentasenya juga cukup besar. Belum lagi ditambah maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS) sebagai tempat beraktivitas usahanya, sehingga dewasa ini air sungai menjadi tidak jernih lagi dan diduga juga tercemar oleh bahan-bahan kimia berbahaya akibat aktivitas pertambangan. Konsumsi air hujan sebagai sumber air minum juga kurang baik untuk kesehatan gigi dan tulang, karena air hujan tidak mengandung zat kapur yang sangat dibutuhkan untuk penguatan pertumbuhan tulang dan gigi.

Gambar 21.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

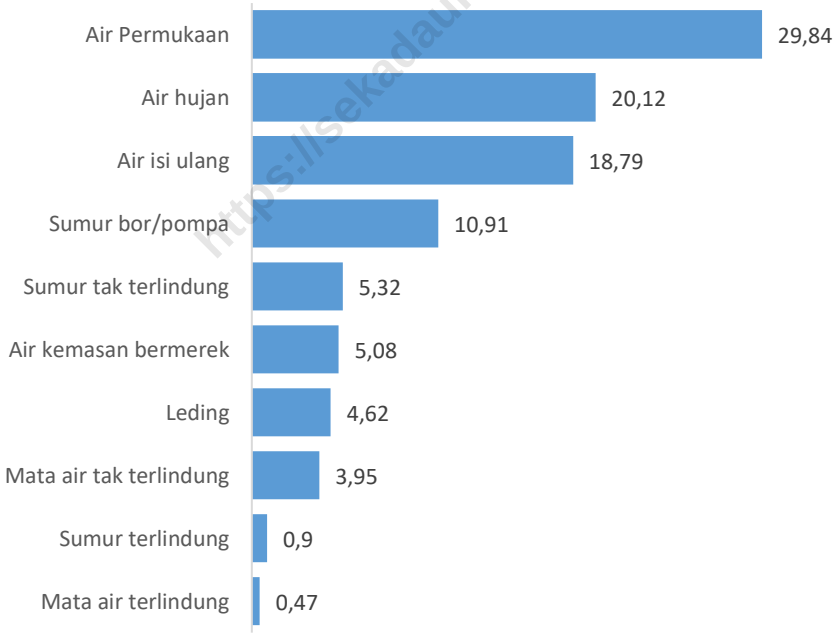

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Masih banyaknya rumah tangga yang mengonsumsi air sungai sebagai sumber air minum, diduga karena selain faktor kebiasaan masyarakat juga disebabkan sulitnya akses terhadap sarana air bersih seperti: air ledeng yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sekadau, air sungai merupakan jalan pintas solusi efektif upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang dekat dengan aliran sungai lebih banyak memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Secara keseluruhan jika dilihat dari sumber air minum, ternyata sumber air minum yang higienis/memenuhi syarat kesehatan yang dikonsumsi penduduk di Kabupaten Sekadau masih relatif kecil persentasenya.

https://sekadaukab.bps.go.id

7.8 Fasilitas Jamban/Kakus

Fasilitas perumahan yang terkait dengan kesehatan lingkungan di antaranya adalah kepemilikan jamban/kakus sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Pembuangan akhir tinja yang dianggap paling dapat dipertanggungjawabkan dipandang dari sisi kesehatan lingkungan adalah kakus sendiri dengan tangki septik. Kakus sendiri dengan tangki septik adalah kakus yang hanya dipergunakan oleh satu rumah tangga bersangkutan, dan dibuat dengan menggunakan saluran pembuangan akhir ke tempat penampungan tinja (tangki).

Di lihat dari sisi kepemilikan fasilitas rumah tangga tersebut, mayoritas masyarakat Kabupaten Sekadau sudah memiliki tempat pembuangan air sendiri dengan persentase sekitar 79,04 persen rumah tangga. Namun persentase rumah tangga di Kabupaten Sekadau yang

tidak mempunyai jamban/kakus sendiri masih cukup besar yaitu sekitar 20,96 persen. Di sisi lain, keberadaan jamban umum sangat terbatas jumlahnya yaitu baru sekitar 2,94 persen rumah tangga yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Gambar 22.
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

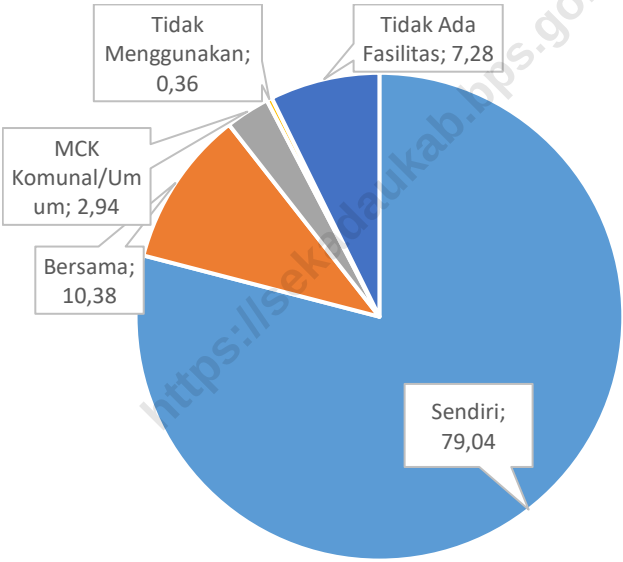

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Kecilnya persentase rumah tangga yang menggunakan jamban umum diduga dominannya adalah karena fasilitas tersebut jumlahnya sedikit dan karena masyarakat tidak mau menggunakannya. Dugaan tersebut terbukti ketika dikaitkan dengan masih cukup besarnya

persentase rumah tangga yang tidak menggunakan jamban. Padahal akan sangat mendukung kesehatan masyarakat apabila fasilitas jamban umum ditingkatkan pada lokasi warga yang tidak memiliki tempat pembuangan air.

Gambar 23.
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

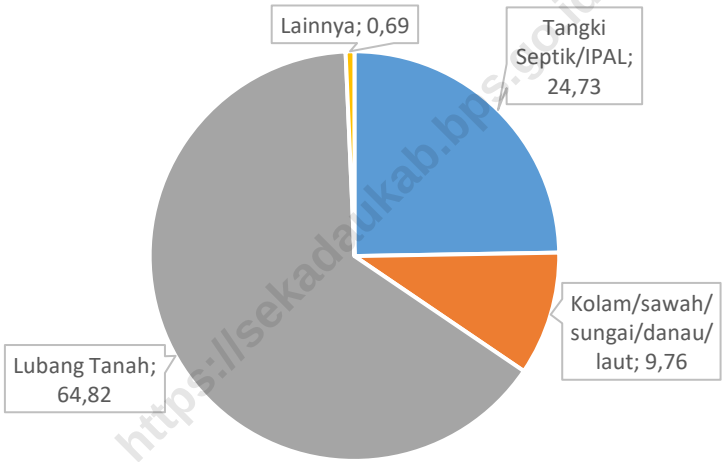

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Pada tahun 2021, sekitar 24,73 persen rumah tangga di Kabupaten Sekadau sudah memiliki tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja, dan sekitar 64,82 persen rumah tangga yang menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Di sisi lain, terdapat sekitar 9,76 persen rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinjanya di kolam/sawah/danau/laut.

Banyaknya rumah tangga yang membuang limbah akhir tinja tanpa menggunakan tangki septik dan lainnya, akan berakibat sangat kurang baik bagi kesehatan dan lingkungan sekitar perumahan. Dipandang dari sudut kesehatan, kotoran tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, sedangkan dari sudut kebersihan rumah dan lingkungan akan dapat menimbulkan bau kurang sedap dan pemandangan yang kurang baik, serta menimbulkan polusi udara bagi lingkungan sekitar. Keadaan ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting nya kesehatan rumah dan lingkungan. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari dinas terkait untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan arti pentingnya kesehatan lingkungan.

https://sekadaukab.bps.go.id

7.9 Penguasaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini telah memengaruhi kehidupan penduduk dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Teknologi informasi kini bukan lagi dianggap sebagai barang mewah, melainkan sebuah kebutuhan bagi penduduk demi mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara luas layanan teknologi infomasi tersebut mencakup penggunaan fasilitas berbasis telekomunikasi seperti internet dan teknologi bergerak *(mobile technology)*, layanan telekomunikasi bernilai tambah seperti komunikasi melalui komputer pribadi dan layanan data, serta layanan siaran seperti TV, radio, dan *satelite broadcasting*.

Penguasaan komputer maupun *laptop* di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 tergolong masih sangat rendah, yakni sekitar 7,66 persen

rumah tangga yang memiliki komputer/*laptop*, yang didominasi oleh penduduk di daerah perkotaan. Hal ini salah satunya diduga berkaitan dengan bidang pekerjaan yang biasanya digeluti oleh penduduk di daerah perkotaan

Gambar 24.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/*Laptop*
di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

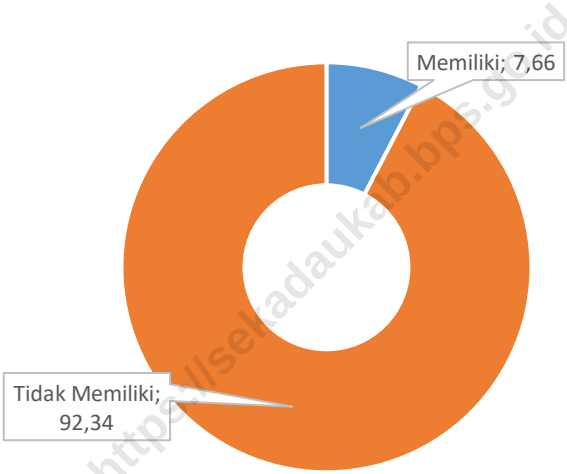

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Pekerja di perkotaan pada umumnya membutuhkan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja di daerah perdesaan. Hal ini karena sebagian besar pekerja di perdesaan merupakan pekerja di sektor pertanian sehingga kurang membutuhkan teknologi komputasi sebagaimana keberagaman sektor ekonomi yang digeluti oleh pekerja di perkotaan. Uraian tersebut terangkum ke dalam Gambar 24 dan Tabel 20.

Internet sebagai salah satu sumber informasi yang multibidang dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu berperan penting dalam kehidupan penduduk pada masa sekarang ini. Dengan internet, apa saja yang baru terjadi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat.

Tabel 19.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Komputer/Laptop dan Klasifikasi Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kepemilikan Komputer/*Laptop*	Perkotaan	Perdesaan	Kabupaten Sekadau
(1)	(2)	(3)	(4)
Memiliki	17,99	6,08	7,66
Tidak Memiliki	82,01	93,92	92,34
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Persentase penduduk Kabupaten Sekadau yang berusia 5 tahun ke atas, yang telah mengakses internet dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dari periode pencacahan pada Bulan Maret tahun 2021 hanya sekitar 34,42 persen. Ada sekitar 30,25 persen penduduk perdesaan dan 61,21 persen penduduk perkotaan yang mengakses internet dalam kurun waktu 3 bulan lalu. Selain itu, jika dirinci lebih jauh berdasarkan jenis kelamin, maka dapat terlihat bahwa penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki (sekitar 19,73%) dibandingkan dengan penduduk berusia 5 tahun ke atas yang berjenis kelamin perempuan (sekitar 14,69%). Secara lebih jelas, informasi di atas dapat dilihat melalui Gambar 25 berikut.

Gambar 25.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Akses Internet, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

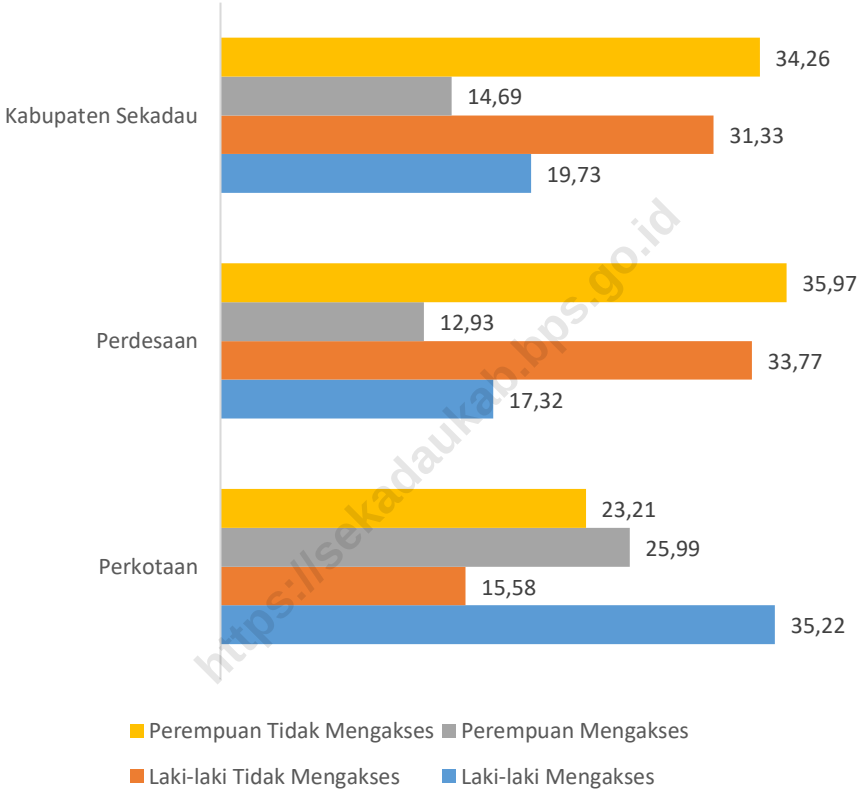

https://sekadaukab.bps.go.id

Sumber: Susenas Maret 2021

Persentase-persentase di atas masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya, terutama kaitannya dengan kemajuan pesat teknologi informasi dewasa ini. Uraian di atas menunjukkan bahwa sebagian kecil saja penduduk Kabupaten Sekadau yang melek akan teknologi dan internet, dan

diperlukan usaha lebih supaya penduduk dapat mengerti dan menggunakan teknologi dan internet lebih sering lagi, karena segala informasi dan pengetahuan dewasa ini dapat diperoleh dari teknologi dan internet. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin tingginya akses teknologi dan internet penduduk Kabupaten Sekadau juga akan meningkatkan pengetahuan yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraannya.

https://sekadaukab.bps.go.id

BAB VIII

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

https://sekadaukab.bps.go.id

Bab VIII
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Indikator sosial yang paling menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat pendapatan. Pendapatan penduduk per kapita mencerminkan produktivitas individu dalam bekerja. Pendapatan merupakan titik akhir dari beberapa indikator sosial yang dibahas dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sekadau 2021.

Hingga saat ini pengumpulan data secara khusus yang menjaring tingkat pendapatan penduduk diakui sangat sulit dilakukan dan datanya kurang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa survei khusus yang menyoroti tentang pendapatan penduduk menghasilkan data yang bias, dan cenderung kurang mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Faktor keengganan rumah tangga untuk memberi jawaban akurat banyak dijumpai pada saat pendataan. Sebagian besar responden enggan mengemukakan pendapatannya dengan jujur karena dibayangi oleh unsur pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Hal ini berimplikasi kepada data yang dihasilkan adalah jawaban responden menjadi cenderung lebih kecil daripada pendapatan riil yang biasanya diterima.

Disadari bahwa pendapatan seseorang memang sukar dihitung, khususnya pendapatan yang tidak menentu. Misalnya, pegawai negeri ataupun buruh/karyawan tetap lainnya, walaupun menerima upah/gaji tetap/rutin per bulan tidak berarti upah/gaji rutin yang biasanya diterima telah mencerminkan pendapatannya, karena mungkin kegiatan tambahan lain yang bernilai ekonomis di luar kegiatan utama atau bagian dari

https://sekadaukab.bps.go.id

kegiatan utama, dan atau tidak jarang menerima imbalan upah/honor yang nominalnya relatif lebih besar daripada upah/gaji rutin yang biasa diterima tidak dilaporkan sebagai komponen pendapatan mereka padahal pendapatan tersebut juga harus dihitung sebagai unsur pendapatannya. Hal ini berarti, segala unsur yang diterima dan menopang perekonomian keluarga baik berupa uang maupun barang secara kumulatif harus dihitung sebagai total pendapatan seseorang.

Selain masalah *under coverage* yang terjadi di atas, terkadang untuk rumah tangga kalangan ekonomi bawah juga memberi jawaban cenderung meninggikan pendapatannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menutupi rasa malu kepada petugas pendata.

Bertolak dari kedua permasalahan di atas, juga mengingat pentingnya data pendapatan penduduk untuk menghitung indikator sosial ekonomi penduduk, maka BPS berupaya menggali data pendapatan yang dianggap representatif yaitu melalui pendekatan variabel pengeluaran atau konsumsi seluruh anggota rumah tangga (*proxy variable)* selama seminggu yang lalu untuk kelompok konsumsi makanan, selama sebulan dan setahun yang lalu untuk kelompok konsumsi nonmakanan. Kedua komponen pengeluaran tersebut selanjutnya diimputasi ke pengeluaran rata-rata rumah tangga per kapita per bulan, baik untuk pengeluaran makanan, nonmakanan, maupun gabungan keduanya.

Konsumsi makanan mencakup seluruh pengeluaran di dalam maupun di luar rumah yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Konsumsi makanan meliputi makanan pokok dan makanan

https://sekadaukab.bps.go.id

tambahan termasuk panganan kecil. Konsumsi nonmakanan meliputi pengeluaran untuk kebutuhan sandang, papan, dan lainnya. Papan atau konsumsi perumahan mencakup: rekening listrik, ledeng, kontrak/sewa/perkiraan sewa rumah, perbaikan ringan rumah, dan sejenisnya. Sandang dan lainnya mencakup konsumsi pembelian pakaian jadi dan alas kaki, pajak bumi dan bangunan, biaya pendidikan, transportasi, asuransi bukan bersifat menabung, biaya pesta/keagamaan selain konsumsi tamu, dan sejenisnya.

Adapun yang tidak termasuk konsumsi rumah tangga adalah segala jenis pengeluaran yang tidak dinikmati langsung oleh seluruh anggota rumah tangga seperti: memberi hadiah, meminjamkan uang, membayar arisan, memasak makanan untuk dijual (usaha) atau diberikan kepada pihak lain, merenovasi rumah berskala besar (investasi), dan sejenisnya.

https://sekadaukab.bps.go.id

8.1 Penduduk Miskin

Hasil dari penghitungan pendekatan variabel pengeluaran atau konsumsi seluruh anggota rumah tangga (*proxy variable)* selama seminggu yang lalu untuk kelompok konsumsi makanan, selama sebulan dan setahun yang lalu untuk kelompok konsumsi nonmakanan adalah tersedianya data jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk melihat seberapa jauh pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM), di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Besaran jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan, atau yang biasa disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sebesar Rp351.726 per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah garis kemiskinan tersebut berarti terklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah sekitar 6,26 persen. Angka ini merupakan keenam terendah di antara 14 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sekadau relatif baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, dengan tingkat kemiskinannya lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin provinsi yang sebesar 7,15 persen pada tahun 2021.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 20.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Misikin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2021

Kabupaten	GK (Rupiah)	Jumlah (000 Jiwa)	%	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	451.173	41,49	7,66	0,76	0,14
Bengkayang	372.793	16,92	6,48	0,80	0,14
Landak	395.486	42,01	10,99	1,29	0,26
Mempawah	387.948	13,82	5,18	0,52	0,11
Sanggau	363.714	21,70	4,55	0,62	0,16
Ketapang	482.824	53,04	10,13	1,42	0,32
Sintang	593.844	39,40	9,28	1,46	0,34
Kapuas Hulu	481.826	24,03	8,93	0,94	0,15
Sekadau	351.726	12,69	6,26	0,78	0,14
Melawi	570.434	25,47	12,01	2,21	0,62
Kayong Utara	321.356	10,72	9,33	1,78	0,46
Kubu Raya	431.211	25,47	4,34	0,47	0,10
Kota Pontianak	578.615	30,11	4,58	0,68	0,20
Kota Singkawang	527.892	11,03	4,83	0,73	0,17
KALIMANTAN BARAT	**483.454**	**367,89**	**7,15**	**1,03**	**0,23**

Sumber: Badan Pusat Statistik

https://sekadaukab.bps.go.id

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Sekadau tahun 2021 bernilai 0,78. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat, angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Sekadau relatif lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding daerah lain.

Lebih lanjut lagi, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Sekadau tahun 2021 bernilai 0,14. Angka ini merupakan yang kelima terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Semakin rendah nilai P2 menunjukkan bahwa semakin rendah ketimpangan pengeluran antarpenduduk miskin di Kabupaten Sekadau dibanding daerah lain.

8.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

https://sekadaukab.bps.go.id

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sekadau untuk kelompok makanan dan nonmakanan pada tahun 2021 dominan berada pada kisaran Rp1.000.00 hingga Rp1.499.999 per bulannya yaitu sekitar 28,67 persen. Sementara jika dirinci berdasarkan jenis pengeluarannya, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sekadau memiliki pengeluaran terhadap makanan berada pada kisaran Rp500.000 hingga Rp749.999. Sementara konsumsi nonmakanan rata-rata berada di kelompok pengeluaran yang relatif lebih rendah, yaitu kurang dari Rp350.000. Gambaran selengkapnya mengenai uraian di atas dapat dicermati pada Tabel 21 berikut ini.

Fenomena pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih besar dari pengeluaran nonmakanan pada tahun 2021, mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan penduduk Kabupaten Sekadau yang biasa diterima, lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Semakin kecil proporsi konsumsi makanan dibandingkan dengan konsumsi nonmakanan di suatu daerah mengindikasikan semakin

baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Sekadau masih tergolong rendah.

Tabel 21.
Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran
Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Golongan Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	Makanan	Nonmakanan	Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
< 350.000	14,60	49,50	2,99
350.000-499.999	23,93	19,95	7,62
500.000-749.999	33,71	17,79	22,63
750.000-999.999	18,14	6,57	21,22
1.000.000-1.499.999	8,11	3,58	28,67
>= 1.500.000	1,51	2,62	16,87
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

8.3 Rata-rata Konsumsi per Kapita

Kebutuhan manusia untuk menunjang kehidupannya terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu kebutuhan pokok (primer) dan kebutuhan penunjang (sekunder). Kebutuhan primer terbagi menjadi tiga jenis yaitu: pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan primer yang satu dengan yang lain saling terkait, dan menuntut pemenuhan guna mendapatkan keutuhan hidup. Kumulatif dari ketiga kebutuhan primer

secara langsung dapat mencerminkan mutu hidup atau tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Pada dasarnya kebutuhan sekunder merupakan kelompok kebutuhan yang tidak selalu menuntut pemenuhan seperti: biaya pendidikan, kesehatan, hiburan, rekreasi, dan sejenisnya. Namun seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan sekunder cenderung terus meningkat.

Hasil Susenas Maret 2021 menunjukan bahwa porsi terbesar konsumsi makanan penduduk Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah pada pemenuhan kebutuhan kelompok makanan dan minuman jadi seperti: nasi campur, teh manis, dan makanan/minuman olahan sejenisnya yaitu sekitar 21,23 persen terhadap total konsumsi makanan, dengan nilai pengeluaran rata-rata sebesar Rp123.616 per bulan per kapita (Tabel 22).

http://sekadaukab.bps.go.id

Kondisi ini dapat dikatakan mengkhawatirkan, mengingat konsumsi kelompok makanan dan minuman jadi masih belum bisa dipastikan kebersihan dan kualitas gizinya. Sehingga diperlukan usaha lebih dari pemerintah untuk kembali mempromosikan bahan-bahan natural seperti ikan, daging dan lain sebagainya sebagai bahan makanan yang baik untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini mengingat bahan-bahan alami mengandung gizi yang baik yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 22.
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Rumah Tangga
Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Jenis Konsumsi Makanan	Rata-Rata Nilai Konsumsi Per Kapita Per Bulan (Rupiah)	Distribusi Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Padi-padian	95.183	16,34
Umbi-umbian	3.648	0,63
Ikan, udang, cumi, kerang, dan sejenisnya	83.947	14,41
Daging	42.732	7,34
Telur dan Susu	28.499	4,89
Sayur-sayuran	52.696	9,05
Kacang-kacangan	8.117	1,39
Buah-buahan	13.754	2,36
Minyak & Kelapa	12.789	2,20
Bahan Minuman	27.183	4,67
Bumbu-bumbuan	13.495	2,32
Konsumsi Lainnya	13.797	2,37
Makanan dan Minuman Jadi	123.616	21,23
Rokok dan tembakau	62.932	10,81
Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan	582.386	100,00

Sumber: Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Yang menarik dari Tabel 22 adalah tingginya konsumsi rumah tangga untuk kelompok rokok, dengan pengeluran mencapai angka Rp62.932 per

bulan per kapita atau sekitar 10,81 persen dari total pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ternyata pengeluaran untuk kelompok ini merupakan tertinggi ketiga proporsinya setelah pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi serta padi-padian. Tingginya proporsi konsumsi sub kelompok ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya masyarakat Kabupaten Sekadau yang lebih memilih mengonsumsi rokok dibandingkan pemenuhan kebutuhan konsumsi lainnya. Selain itu, apabila dipandang dari sisi kesehatan, konsumsi ini tidak memiliki nilai tambah bahkan berisiko untuk mendegradasi kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Sekadau.

Tabel 23 memperlihatkan bahwa porsi terbesar konsumsi nonmakanan rumah tangga di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 adalah untuk kelompok perumahan, termasuk biaya pemeliharaan ringan perumahan, dan segala fasilitas yang terkait dengan perumahan. Kelompok ini menyerap sekitar 59,92 persen terhadap total konsumsi nonmakanan, dengan nilai pengeluaran rata-rata sebesar Rp249.812 per bulan per kapita. Sedangkan pengeluaran terbesar kedua ada di kelompok pengeluran aneka barang dan jasa dengan proporsi sebesar 21,25 persen dengan nilai pengeluaran sebesar Rp88.587. Selanjutnya, pengeluaran terbesar ketiga adalah kelompok pengeluaran pajak dan asuransi dengan proporsi sebesar 6,64 persen dengan nilai pengeluaran sebesar Rp27.689. Yang menarik adalah nilai dan proporsi untuk pengeluran selain yang diungkapkan di atas yang berada di kisaran proporsi 2 hingga 5 persen dengan nilai pengeluaran berada dikisaran tidak lebih dari Rp24.000.

https://sekadaukab.bps.go.id

Tabel 23.
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Nonmakanan Rumah Tangga
Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Jenis Konsumsi Nonmakanan	Rata-Rata Nilai Konsumsi Per Kapita Per Bulan (Rupiah)	Distribusi Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Perumahan	249.812	59,92
Aneka Barang & Jasa	88.587	21,25
Pakaian & Alas Kaki	17.553	4,21
Barang Tahan Lama	23.142	5,55
Pajak & Asuransi	27.689	6,64
Keperluan Pesta	10.147	2,43
Rata-Rata Kabupaten	416.930	100,00

Sumber : Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Sekadau memandang kebutuhan primer seperti papan sebagai hal yang cukup penting. Sedangkan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pesta dan sandang masih memberi porsi yang kecil dalam prioritas pengeluaran mereka.

8.4 Proporsi Pengeluaran

Distribusi persentase pengeluaran penduduk per kapita per bulan antara kelompok makanan dengan nonmakanan di Kabupaten Sekadau

diperlihatkan pada Tabel 24 menunjukkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan sekitar 58,28 persen, sedangkan sisanya adalah pengeluaran kelompok nonmakanan yaitu sekitar 41,72 persen masing-masing terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga yang sebesar Rp999.316 per kapita per bulan.

Tabel 24.
Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita/Bulan Menurut Kelompok Konsumsi dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Kelompok Konsumsi	Perkotaan (Rupiah)	Perdesaan (Rupiah)	Kabupaten Sekadau (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	679.665 ***(56,43%)***	567.297 ***(58,64%)***	582.386 ***(58,28%)***
Nonmakanan	524.781 ***(43,57%)***	400.202 ***(41,36%)***	416.930 ***(41,72%)***
Rata-rata Sebulan	1.204.446 ***(100%)***	967.499 ***(100%)***	999.316 ***(100%)***

Sumber : Susenas Maret 2021

https://sekadaukab.bps.go.id

Menurut teori ekonomi, salah satu ciri negara maju adalah rata-rata nilai konsumsi primer khususnya sub kelompok makanan relatif lebih kecil proporsinya dibandingkan dengan konsumsi nonmakanan, dan cenderung terus menurun setiap tahunnya. Di lain sisi, konsumsi nonmakanan proporsinya cenderung terus meningkat khususnya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, jasa rekreasi,

dan aneka jasa-jasa lainnya. Adapun yang dimaksud menurun pada kelompok makanan dan meningkat pada kelompok nonmakanan hanya sebatas proporsi biaya pengeluaran, sedangkan kuantitas maupun kualitas barang dan jasa selalu diupayakan meningkat seiring dengan tingkat pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Di negara-negara miskin rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita pada kisaran 60-80 persen dari total konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan kelompok makanan. Secara umum, proporsi kelompok konsumsi makanan pada tahun 2021 di Kabupaten Sekadau yang sebesar 58,28 persen, mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Sekadau masih sedikit di atas status sebagai daerah/negara miskin, walaupun untuk ruang lingkup yang kecil. Mengingat proporsi konsumsi makanan yang masih mendominasi, dapat dikatakan sebagian besar pendapatan penduduknya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau masih perlu ditingkatkan lagi. Kondisi seperti ini relatif dapat dimaklumi mengingat kabupaten ini adalah kabupaten dengan daerah yang cukup luas dan didominasi daerah perdesaan, sehingga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara utuh tentunya membutuhkan tahapan dan waktu yang relatif lama.

Oleh sebab itu, upaya untuk menggali secara optimal melalui berbagai terobosan baru dalam rangka memperkokoh pijakan perekonomian daerah harus ditingkatkan, agar secara berangsur sebagian masyarakat Kabupaten Sekadau yang tergolong pada klasifikasi perekonomian menengah ke bawah dapat segera terbebas dari belenggu kemiskinan. Dari sisi pemerintah daerah, dapat mempercepat mengejar

https://sekadaukab.bps.go.id

ketertinggalannya terhadap daerah lain yang lebih dulu definitif dan maju dalam proses dinamika pembangunan yang meng-*global*, serta optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirasa perlu segera menggali berbagai terobosan sumber ekonomi baru yang berbasis potensi lokal. Diantaranya: potensi sektor pertanian seperti perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi perdagangan antardaerah, dan sebagainya yang berpeluang cukup besar untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Sekadau dan sejalan dengan kondisi dan letak geografis Kabupaten Sekadau.

https://sekadaukab.bps.go.id

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2011). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: BPS.

----------. (2011). *Statistik Perumahan Indonesia Hasil SP 2010*. Jakarta: BPS.

----------. (2015). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta: BPS.

Hidayat, A. Aziz Alimul. (2008). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Indrayani, Euis dan Syafii Achmad. (2012). *Dampak Pendidikan Bagi Usia Pernikahan Dini dan Kemiskinan Keluarga*. Dalam Gemari Edisi 143/Tahun XIII/ Desember 2012. Jakarta: Gemari.

Munir, Rozy. (1981). *Dasar - Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi dan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi.

Purwanti, Sri Hubertin. (2004). *Konsep Penerapan ASI Eksklusif*. Jakarta: EGC.

Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Pendidikan.

WHO. (2011). *Life Expectancy in Indonesia*. http://worldlifeexpectancy.com/indonesia-life-expectancy.html (diakses 02 Desember 2020)

https://sekadaukab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://sekadaukab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEKADAU

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau, Jl. Merdeka Timur Km. 09, Gonis Tekam, Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 79515

Email: bps6109@bps.go.id, Telp +62 (0564) 2042009

Website: sekadaukab.bps.go.id